



FEODALISME DAN REVOLUSI 1945 DI SULAWESI SELATAN

PIDATO PENGUKUHAN

**Diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap
Dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro
Di Semarang pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 1989**

**Oleh
Prof. Dr. Hamid Abdullah**

Bismillahi Rakhmani Rahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Yth. Sdr. Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro,

Yth. Sdr. Anggota Senat/Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro,

Yth. Sdr. Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,

Yth. Sdr. Pembantu Rektor Universitas Diponegoro,

Yth. Sdr. Para Dekan dan Pembantu Dekan Universitas Diponegoro,

Yth. Sdr. Anggota Senat Fakultas Sastra Universitas Diponegoro,

Yth. Sdr. Para Tamu Undangan,

Yth. Keluarga Besar Universitas Diponegoro,

Para hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya dihari yang berbahagia ini untuk pertama-tama mengucapkan rasa syukur saya sekeluarga atas karunia yang diberikan oleh Allah Subahana Wata'ala dalam menempuh perjalanan hidup yang panjang ini. Cobaan yang telah diberikan silih berganti selama ini oleh Allah, merupakan nikmat yang tiada taranya. Dalam cobaan yang saya alami selama perjalanan hidup saya ini, makin mendekatkan hati saya kepadaNya, makin larut saya dalam kekudusanNya, dan hati saya telah terbakar oleh api ajaran keimananNya. Jikalau saya berdiri disini mengucapkan pidato pengukuhan Guru Besar didepan para hadirin yang saya hormati, maka itu bermakna, bahwa Allah telah melindungi seluruh perjalanan hidup saya selama ini, termasuk keluarga saya. Kemudian saya selalu berdoa. agar sampai diakhir perjalanan hidup saya selalu dilindungi dari sifat angkara murka, sifat iri hati orang-orang yang tidak beriman dan jangan terbujuk oleh pengaruh orang-orang munafik kepada Agama dan pengkhianat bangsa. Semogalah kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi olehNya.

Para hadirin yang saya hormati,

Dalam pidato pengukuhan ini, adalah berusaha merekonstruksi peristiwa sejarah yang menyangkut perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari invasi militer Belanda. Yaitu meliputi periode revolusi pisik 1945 - 1949. Dalam periode revolusi itu, telah terjadi perubahan sosial yang bersifat struktural dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, revolusi 1945, tidak saja bermakna untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari invasi militer Belanda, tapi juga bermakna, bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah berlangsung perjuangan untuk merubah sistem sosial yang tidak lagi relevan dengan spirit revolusi 1945. Oleh karena itu, selama revolusi berlangsung telah terjadi pula pergeseran nilai yang salah satu konsekuensinya, lahirlah kemudian "kelompok elit revolusi".¹ Kelompok ini lahir di zaman revolusi yang disamping berjuang mempertahankan kemerdekaan, juga untuk membentuk nilai baru yang dijiwai oleh semangat kerakyatan berdasarkan filsafat negara Pancasila dan UUD 1945 yang telah disyahkan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia atau oleh pendiri republik ini ketika selepas kita menyatakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kelompok elit revolusi ini bukan berasal dari produk pemerintah kolonial Belanda, atau berasal dari sistem sosial yang berorientasi pada sistem feodalisme, tapi pada kenyataannya, berasal dari semua lapisan sosial di masyarakat. Mereka itu, kemudian

di pilih oleh masyarakat sebagai pemimpin mereka, dan mempunyai pengaruh yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Kharisma dari kelompok elit revolusi ini, telah berjaya menggerakkan rakyat baik dalam melawan invasi militer Belanda, maupun dalam melakukan perubahan sosial di masyarakat. Mereka itu berasal dari, ulama di Pesantren, pemimpin laskar perjuangan, pemimpin politik, kelompok intelektual yang nasionalistis, pemimpin tentara pelajar dan kelompok eksekutif republik.²

Selama revolusi berlangsung, kelompok elit revolusi inilah yang dapat dikatakan mempunyai peranan yang dominan dalam melakukan berbagai perubahan sosial di masyarakat. Dalam konteks perubahan yang mereka lakukan itu, maka masalah yang menarik untuk disimak dari pertarungan politik Bangsa Indonesia melawan Belanda, adalah periode 1945 - 1949. Pasalnya, kecuali periode itu yang menentukan perjalanan panjang dari bangsa kita sejak VOC di abad ke XVII melikwidir kesatuan politik wilayah Nusantara ini sampai runtuhnya kekuasaan politik pemerintah jajahan Belanda di tahun 1942, yaitu dengan pendudukan militer Jepang sampai tahun 1945, juga karena periode itu terjadi pergeseran nilai dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³ Pergeseran nilai atau perubahan yang terjadi itu diwarnai oleh semangat revolusi 1945. Setiap individu dan setiap kelompok sosial di masyarakat, selama revolusi berlangsung telah mengalami proses perubahan nilai yang adakalanya mengejutkan, dan tidak terlepas dari unsur yang menegangkan. Akan tetapi, perubahan yang drastis yang terjadi selama revolusi berlangsung, pada akhirnya telah berjaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang bernaung di bawah lambang negara "Bhinneka Tunggal Ika". Dan kemudian bersepakat menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai sumber kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

Potret masyarakat Indonesia sebelum terjadinya revolusi 1945, merupakan produk dari sistem sosial tradisional yang berorientasi kepada budaya feodal dan produk dari sistem politik dari pemerintah jajahan Belanda yang telah dicanangkan selama puluhan tahun dan bahkan dibeberapa kawasan seperti di Jawa,⁵ telah berlangsung lebih dari satu abad. Atas dasar kondisi dan tipe masyarakat ini, maka ketika revolusi 1945 meletus, terjadilah kemudian pertarungan antara nilai budaya lama dan nilai budaya baru yang lahir di zaman revolusi 1945. Oleh karena itu, revolusi 1945 dikenal juga sebagai revolusi yang bersifat "multi kompleks". Maksudnya, bahwa disamping revolusi itu meledak dengan sasaran utamanya untuk mempertahankan kemerdekaan dari invasi militer Belanda, juga di masyarakat telah terjadi pula "revolusi sosial".⁶ Dalam revolusi sosial ini, sasarannya adalah perjuangan dari lapisan bawah untuk merombak sistem sosial yang bernafaskan kebudayaan feodal, sistem strata peninggalan atau produk pemerintahan jajahan Belanda, dan perombakan tradisi budaya yang tidak lagi relevan dengan semangat revolusi 1945.

Ada tiga kawasan di tanah air kita yang tidak dapat menghindar dari ledakan revolusi sosial yang terjadi dalam periode revolusi nasional 1945. Ketiga daerah ini pada zaman penjajahan Belanda, terkenal atau dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai kawasan yang mengamalkan sistem sosial yang bersifat feodalistis. Disamping itu, telah dikombiner oleh sistem politik dari pemerintah jajahan Belanda. Kosekuensi dari kondisi sosial masyarakat dari ketika kawasan itu, maka kelompok lapisan bawah atau masyarakat, bangkit di zaman revolusi 1945, untuk melakukan

perombakan yang bersifat struktural terhadap sistem sosial masyarakat mereka. Dengan demikian, terjadilah pertarungan antara kelompok "Principality" atau yang lebih terkenal dengan kelompok aristokrat atau bangsawan di satu pihak, dengan kelompok nasionalis sebagai produk dari revolusi 1945 di lain pihak. Adapun ketiga kawasan yang dilanda oleh revolusi sosial itu, adalah Surakarta, Aceh, dan Sumatra Timur.⁷

Kelompok pincinality, berusaha mempertahankan sistem sosial mereka yang feodalistis dan masih terselip harapan akan kembalinya kejayaan masa lampau dari pemerintah jajahan Belanda yang merupakan pendukung utama dari sistem sosial mereka. Sebaliknya kelompok lawasanya, yang terdiri dari kelompok nasionalis baik yang berasal dari partai-partai politik, organisasi massa, maupun yang berasal dari organisasi perjuangan seperti kelompok laskar, berusaha merombak secara struktural sistem sosial feodal ke sistem sosial baru yang bernafaskan nasionalisme.⁸ Maksudnya, agar dalam kehidupan masyarakat tidak lagi dijumpai perbedaan status sosial yang berdasarkan keturunan (kebangsawanan), tapi semua manusia Indonesia mempunyai derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Dengan begitu, maka sistem strata yang telah hidup di masyarakat sejak zaman kolonial Belanda, mereka perjuangkan untuk dihapus di bumi Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945.⁹

Pertarungan antara dua kelompok ini, akhirnya meledak dalam bentuk konflik terbuka atau pertarungan fisik. Jelas, akhirnya korban fisik yang berupa jiwa manusia dan harta benda berjatuh. Namun, pertarungan dengan akibat yang tidak dapat diukur berapa nilainya itu, akhirnya dapat menyelesaikan masalah sosial, termasuk politik, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dan benar juga apa yang dikatakan oleh Lewis Gosser,¹⁰ bahwa tidak semua konflik dapat mendatangkan malapetaka di masyarakat, tapi konflik dapat juga menyelesaikan pertarungan yang berlarut-larut dalam suatu perdamaian di masyarakat. Apa yang terjadi di tiga kawasan yang dilanda oleh revolusi sosial itu, kini telah selesai semuanya. Semua peristiwa yang terjadi, hanya tinggal catatan sejarah untuk dijadikan cermin dalam kehidupan untuk menghadapi masa depan.

Demikianlah, revolusi telah merubah sikap manusia dalam masa yang relatif singkat. Kata "Bung" yang lahir di zaman revolusi telah menjadi pengganti gelar bangsawan yang jaya di zaman Belanda. Kata Bung, tidak saja bermakna "saudara", tapi juga mengandung unsur nasionalisme, yaitu melambangkan persamaan derajat di masyarakat. Di zaman revolusi itulah orang banyak yang meninggalkan gelar bangsawannya. Mereka malu, karena semangat revolusi telah merata di masyarakat. Tentu saja tidak termasuk mereka yang menjadi pengkhianat bangsa, atau yang menjadi antek pemerintah Belanda.¹¹

Kerangka Teori

Crane Brinton,¹² yang terkenal dalam karyanya "The Anatomy of Revolution", telah mengulas dengan menarik empat buah revolusi besar yang terjadi di dunia ini. Keempat revolusi yang diulas itu, adalah : Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Inggris dan Revolusi Rusia. Dari analisis yang telah dilakukan oleh Crane Brinton terhadap keempat revolusi besar itu, kita dapat memperoleh gambaran yang

jelas tentang apa makna dari suatu revolusi bagi kehidupan umat manusia dalam usahanya melakukan pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bernegara, tentang munculnya kelompok baru di masyarakat yang menjadi sponsor dari revolusi, tentang munculnya atau lahirnya kelompok elit baru dalam revolusi, tentang aspirasi kelompok revolusioner, tentang pemerintahan teror selama revolusi berlangsung, tentang pergeseran kekuasaan dikalangan pemimpin revolusi, tentang penyelewengan-penyelewengan politik yang terjadi dalam negara yang sedang dilanda revolusi, dan sebagainya.¹³

Crane Brinton, akhirnya tiba pada suatu kesimpulan, bahwa baik revolusi yang terjadi di Prancis, Amerika, maupun yang terjadi di Inggris dan Rusia, telah disertai oleh pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara drastis. Oleh karena perubahan itu bersifat drastis, maka sistem nilai yang tadinya telah "established", atau telah mapan, mengalami perubahan yang bersifat kontradiktif dengan nilai baru yang muncul selama revolusi berlangsung. Ada dua kelompok sosial yang menarik untuk diketengahkan disini dalam konteks pergeseran nilai itu, yakni kelompok bangsawan yang menjadi pendukung dan pemilik kebudayaan feodal, dan kelompok rohaniawan yang pada masa sebelum revolusi berlangsung telah mendominasi kehidupan spiritual kelompok penguasa dan sekaligus mempengaruhi kehidupan politik dari "The Old Regime."¹⁴ Kedua kelompok ini selama revolusi berlangsung, telah menjadi sasaran utama dalam revolusi. Pasalnya, kedua kelompok sosial ini oleh masyarakat, terutama di Perancis, dan Rusia, menjadi sponsor dari kehidupan agama yang bersifat dogmatis di masyarakat, terikatnya masyarakat dalam kehidupan tradisional yang mematikan kreativitas individu dan kemerdekaan berfikir, kebangkrutan ekonomi, penindasan manusia oleh kelompok feodal yang berkuasa, dan sebagainya.¹⁵ Sedang revolusi Amerika, sifatnya lain karena sasaran utamanya adalah untuk melepaskan diri dari penjajahan Asing. Rakyat Amerika berusaha membentuk negara nasional yang memiliki kedaulatan sendiri. Akan tetapi meskipun demikian baik rakyat Amerika, maupun rakyat Inggris, Perancis dan Rusia, semuanya menghendaki dalam revolusinya suatu perubahan nilai atau perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan argumentasi dari Crane Brinton ini, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Neil Smelser¹⁶ yang menyatakan, bahwa setiap revolusi juga bermakna suatu pergeseran nilai dan setiap revolusi harus disertai oleh Perubahan Sosial. Seperti umpamanya, perubahan tingkah laku manusia di masyarakat, perubahan persepsi masyarakat terhadap agama, perubahan sikap manusia dalam dunia realitas dan dalam menghadapi masa depan, perubahan pemikiran, perubahan terhadap nilai budaya tradisional, dan lain-lain. Semua pergeseran nilai atau perubahan sikap itu terjadi, karena masyarakat telah sadar tentang eksistensinya sebagai manusia dan sebagai warganegara dalam kehidupan bermasyarakat.

Pergeseran nilai yang terjadi dalam suatu revolusi, adalah peristiwa yang umum terjadi dalam revolusi dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.¹⁷ Dia berlangsung secara tiba-tiba dan merubah suatu sistem yang telah hidup di masyarakat dalam masa yang relatif singkat. Tidak seorangpun, atau katakanlah kelompok-kelompok sosial yang terdapat dalam struktur sosial yang dapat terhindar dari pergeseran nilai atau perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya,

pergeseran nilai dalam setiap revolusi bersifat "struktural". Maknanya, bahwa pergeseran nilai itu menyangkut semua aspek dari kehidupan manusia. Seperti, aspek religius, aspek ekonomi, aspek kepemimpinan, aspek kehidupan politik, aspek sosial budaya, aspek pendidikan dalam keluarga, interaksi sosial di masyarakat, dan sebagainya.

Namun, yang patut diperhatikan dengan seksama, bahwa pergeseran nilai atau perubahan sosial itu kemudian mengakibatkan munculnya sistem sosial baru di masyarakat. Sistem ini, jelas memiliki karakteristik yang tersendiri yang adakalanya sangat berbeda dengan sistem yang pernah terdapat sebelumnya. Misalnya, dalam kehidupan politik dan sistem kepemimpinan. Jika dalam zaman pemerintahan the old regime, sistem politik yang berlaku, adalah sistem politik despotisme/absolut, dan kemudian sistem sosialnya menganut sistem sosial yang bersifat feodalistis, maka selama dan setelah revolusi itu berlangsung yang muncul kemudian adalah sistem politik yang sesuai dengan keinginan atau aspirasi dari masyarakat, atau apa yang menjadi konsep pemikiran dari para sponsor revolusi.¹⁸ Jika masyarakat itu dalam mencetuskan suatu revolusi menghendaki sistem politik yang bersumber pada "power" atau kekuasaan, seperti konsep kekuasaan dari Niccolo Machiavelli dalam bukunya, "Il Principe", maka muncullah sistem politik yang bersifat Diktator, Fasis atau sistem politik Totalitarianisme.

Apabila yang menjadi penaja atau sponsor dalam suatu revolusi mencita-citakan unsur kebebasan dan kemerdekaan, serta persaudaraan dalam kehidupan masyarakat, maka lahirlah kemudian sistem politik yang berdasarkan demokrasi. Dalam sistem ini, hak azasi manusia dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu, undang-undang merupakan norma yang mutlak dipatuhi oleh setiap manusia di masyarakat. Akan tetapi, bila sebaliknya suatu bangsa telah didominasi oleh ideologi Marxisme, maka tentu saja bentuk negara dan sistem politiknya menggunakan konsep ideologi Komunis.

Dalam kaitan ini, J.B. Chitambar,¹⁹ seorang pakar Sosiologi menyatakan bahwa dalam pergeseran nilai atau perubahan sosial yang menyangkut kehidupan politik, ada dua hal yang patut diperhatikan, Kedua hal atau faktor itu yang banyak menentukan proses muncul dan berkembangnya perubahan dan pergeseran nilai di masyarakat. Kedua faktor yang dimaksud ini, adakalanya saling menunjang dalam proses terjadinya pergeseran nilai di masyarakat, tapi tak jarang pula berjalan sendiri-sendiri. Semuanya tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dan politik dari masyarakat yang sedang dilanda oleh pergeseran nilai itu. Adapun kedua faktor yang dimaksud oleh Chitambar itu, adalah :

1. The Innovator of Ideas, dan
2. The political Leadership²⁰

The Innovator of Ideas, merupakan ide pembaharuan yang muncul dan kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ide pembaharuan yang telah diterima oleh masyarakat secara luas dan kemudian tertanam dalam hati dan pemikiran mereka, mengakibatkan munculnya perangsang kearah perubahan sikap mental dalam menghadapi dunia realitas. Disamping itu, juga menimbulkan motivasi baru bagi setiap individu atau kelompok sosial dalam menghadapi masa depannya. Dari perubahan sikap mental yang terjadi selepas adanya dampak ide pembaharuan,

muncullah kemudian koreksi yang spontan, baik yang bersifat individualistis, maupun yang digerakkan oleh kelor-pok-kelompok sosial yang terdapat di masyarakat.

Sebaliknya faktor *The Political Leadership*, adalah yang menyangkut fungsi dan peranan dari kelompok penguasa atau pemegang kekuasaan politik yang menguasai masyarakat. Kelompok penguasa ini dalam kebijakan yang dilaksanakannya, menyebabkan munculnya perubahan sikap, tingkah laku, dan pandangan hidup, dari masyarakat yang dipimpinnya. Apabila salah seorang dari kelompok pemimpin politik itu ada yang memiliki kharisma di masyarakat, terlebih lagi bila memperoleh dukungan yang bersifat total dari sebahagian anggota masyarakat, maka proses perubahan itu akan lebih cepat lagi terwujud. Ini, disebabkan karena sang pemimpin dengan kekuasaan dan kharisma yang dimilikinya dapat mempengaruhi secara langsung terjadinya perubahan atau pergeseran nilai di masyarakat. Dia, lebih mudah pula mengontrol masyarakat, terutama para pendukungnya, untuk merubah sistem politik yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²¹

Sekarang, kelompok sosial mana yang umumnya menjadi penaja dalam setiap revolusi? Baik Grane Brinton, Tocquville, maupun Jan Romein dan Marc Bloch,²² menyatakan bahwa umumnya yang menjadi penaja dari revolusi-revolusi besar di dunia, adalah kelompok Borjuis (klas menengah). Kelompok ini telah mulai terlihat di masyarakat sebagai suatu kekuatan sosial di Eropah, sejak abad ke 17. Dan kemudian kelompok ini berkembang terus pada abad ke 18, kemudian kehadirannya dalam abad ke 19 mempunyai peranan yang menentukan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Di Eropa, kelompok ini sudah banyak mempengaruhi pandangan pemikiran masyarakat pada ke 18. Terutama di Prancis yang mengamalkan sistem politik despotisme.²³ Oleh karena dalam sistem politik tersebut, mereka dapat dikatakan tidak berperanan, di tambah lagi oleh sistem masyarakat yang berlaku di masa itu adalah sistem masyarakat feodal, maka kelompok sosial Borjuis ini lalu bergerak di masyarakat untuk melakukan suatu perubahan. Perjuangan mereka yang berlangsung selama puluhan tahun, akhirnya membuahkan revolusi di masyarakat.²⁴

Kelompok Borjuis atau klas menengah ini, adalah terdiri dari kelompok entrepreneur, kapitalis-kapitalis, bankir-bankir, kelompok intelektual, kelompok hakim/pengacara, kelompok militer, kelompok jurnalis atau wartawan, kelompok seniman, dan lain-lain. Tujuan mereka untuk melakukan perubahan, baik dalam kehidupan sosial dan kebudayaan, maupun dalam kehidupan politik dan juga yang menyangkut kehidupan spiritual, adalah untuk menciptakan suatu sistem sosial baru yang menempatkan manusia diakui eksistensinya hidup di dunia. Atau, dengan lain perkataan, untuk menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar. Yaitu, hak dan kewajibannya dilindungi oleh undang-undang negara, demikian pula kemerdekaannya dan kebebasannya untuk menentukan apa yang terbaik untuk hidupnya.

Kelompok ini anti kepada feodalisme, karena feodalisme seperti yang terdapat dalam sejarah Perancis telah mengeksploit kebebasan rakyat, hidup rakyat, melalui kekuasaan yang dipegangnya secara turun temurun.²⁵ Namun, yang paling dibenci atau yang tidak disenangi oleh kelompok Borjuis ini, adalah yang menyangkut "privilege" atau hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok feodal atau kelompok

bangsawan di masyarakat. Masalahnya, karena dengan melalui privilege yang dimilikinya itu, dia mempunyai hak untuk melakukan pengadilan sendiri, membuat aturan sendiri untuk menekan rakyat yang berdiam di kawasan kekuasaannya, berhak menetapkan harga hasil produksi pertanian dari para petani, membatasi ruang gerak dengan berbagai macam tradisi yang diciptakannya.

Kecuali itu, kelompok Borjuis anti kepada tradisionalisme, karena tradisionalisme mengekang kebebasan manusia dan menjerat manusia dalam siklus kehidupan budaya yang mematikan. Padahal menurut kaum Borjuis, budaya dibuat atau diciptakan oleh manusia bukan untuk mengikat atau membatasi kebebasan manusia dalam mengembangkan potensinya di masyarakat, tapi budaya justru untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Itulah sebabnya, tradisionalisme harus dironbak untuk disesuaikan dengan kemajuan zaman, agar tradisionalisme dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap manusia.²⁶

Begitulah, akhirnya kelompok kelas menengah atau kelompok Borjuis ini tampil sebagai penaja di dalam revolusi-revolusi besar yang terjadi di dunia. Feodalisme akhirnya ambruk di Eropa, dan kemudian muncul Demokrasi, Patriotisme dan Nasionalisme. Perkembangan sistem politik yang berdasarkan Demokrasi dengan semangat Nasionalisme modern, kemudian tersebar di seluruh dunia. Dampak dari empat buah revolusi itu banyak mempengaruhi pertumbuhan demokrasi baik di Eropa daratan/kepulauan, maupun di luar Eropa, seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Profile Feodalisme Sulawesi Selatan

Sekarang timbul pertanyaan, mengapa di Sulawesi Selatan tidak terjadi revolusi sosial seperti halnya yang terjadi di Jawa dan Sumatra? Padahal, kawasan Sulawesi Selatan sejak zaman kolonial Belanda dan sampai Proklamasi Kemerdekaan 1945 kelompok bangsawan tetap berperan dalam sistem sosial dan mendominasi tempat yang strategis dalam dunia pemerintahan? Faktor apa yang menyebabkan?

Baiklah, untuk menjawab serangkaian pertanyaan itu, maka eloklah kita perhatikan beberapa faktor di bawah ini. Dari uraian atau analisis berdasarkan fakta sejarah ini, akan diperoleh jawaban yang dimaksudkan tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan itu, adalah:

Pertama, bahwa raja dan kelompok bangsawan dalam sistem politik tradisional telah terikat pada suatu **Governmental Contract**²⁷ atau perjanjian pemerintahan dengan rakyat atau dengan masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian dalam sistem sosial yang berlaku dalam struktur sosial, tercipta pula semacam **Kontrak Sosial**²⁸ antara penguasa yang umumnya terdiri dari kelompok aristokrat dengan masyarakat. Baik yang menyangkut perjanjian pemerintahan, maupun yang menyangkut kontrak sosial yang telah tercipta sejak masyarakat Bugis Makassar membentuk organisasi kenegaraan mereka, kesepakatan antara penguasa dan rakyat telah dipatuhi dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum VOC datang ke kawasan ini pada abad ke XVII.

Dalam perjanjian pemerintahan atau dalam kontrak sosial itu, telah diatur dan ditetapkan tentang batas-batas kekuasaan kelompok penguasa di masyarakat atau

terhadap rakyat yang dipimpinnya.²⁹ Seperti hak raja atau penguasa untuk memberikan perlindungan kepada hak milik rakyatnya, melindungi rakyatnya dari perbuatan yang bersifat sewenang-wenang, berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpinnya, tidak membedakan kelompok-kelompok yang hidup dan berada di bawah kekuasaannya, menghormati hak suara rakyatnya, raja dan penguasa juga tunduk dan patuh serta melindungi adat yang hidup di masyarakat dan sebagainya.

Untuk itu, elok kita perhatikan salah satu cukilan perjanjian pemerintahan atau kontrak sosial antara raja atau penguasa dengan rakyat, seperti yang termuat dalam Lontara.

Kami tidak akan tertikam oleh senjatamu, dan engkau tidak akan tertikam oleh senjata kami.

Bertitablak engkau, dan kami tunduk patuh. Kalau kami menjunjung, maka kami tidak akan memikul. Kalau kami memikul, maka kami tidak akan menjunjung.

Bawasanya kami mempertuan engkau, banya diri pribadi kamilah yang mempertuan engkau, bukan barta benda kami.

Engkau tidak akan mengambil ayam dari kandang ayam kami, tidak mengambil kelapa kami sebutirpun dan tidak mengambil pinang setandang pun dari kami.

Jika engkau mengingini barang kepunyaan kami, engkau membelinya yang patut dibeli, engkau menggantinya yang patut diganti, engkau memintanya yang patut diminta dan kami akan memberikannya kepada engkau.

Engkau tidak boleh mengambil begitu saja terus nullik kami.³⁰

Oleh karena dalam kontrak sosial antara kedua belah pihak itu telah ditetapkan batas-batas hak dan kewajiban antara keduanya. Maka pihak raja dengan kelompok aristokratnya dituntut pula reputasi sosialnya yang terpuji di masyarakat. Ini, dimaksudkan agar setiap pemimpin dapat menjadi panutan dari masyarakat yang dipimpinnya.³¹

Apabila ternyata dikemudian hari ada seorang raja atau penguasa yang melakukan penyelewengan atau telah melanggar persepakatan yang telah menjadi undang-undang di masyarakat itu, maka rakyat mempunyai hak untuk melakukan protes atau reaksi terhadap raja dan penguasanya. Jika seandainya protes dan koreksi yang bersifat normal itu kepada rajanya, sama sekali tidak digubris atau diperhatikan, maka rakyat dapat melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Yaitu, dapat berupa meninggalkan kampung halamannya sebagai protes kepada penguasanya. Bila terjadi hal yang demikian ini, maka adat melindungi semua harta benda rakyat yang ditinggalkannya itu. Tidak seorangpun yang dapat menjamahnya, termasuk kelompok penguasa. Akan tetapi, tindakan yang paling keras dari rakyat kepada raja atau penguasanya, adalah bila semua rakyat yang dilindungi oleh adat melakukan pengadilan terbuka kepada rajanya yang melakukan penyelewengan itu. Bila ternyata kemudian sang raja atau penguasa itu telah terbukti bersalah atas tuduhan dan tuntutan yang diajukan oleh rakyat, maka sang raja dapat dijatuhi hukum pudana sesuai dengan ketetapan adat yang telah berlaku. Sebab itu, dalam masyarakat Bugis Makassar atau dalam masyarakat Sulawesi Selatan, cukup banyak dijumpai raja atau

kelompok penguasa, termasuk keturunannya yang bergelar bangsawan yang telah terkena pidana oleh adat, seperti di hukum buang, di bunuh oleh rakyatnya dan diusir atau dibuang oleh rakyatnya.³²

Berangkat dari kenyataan yang berlaku di masyarakat ini, maka tidak secara otomatis seorang anak raja, anak keluarga bangsawan yang dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja atau sebagai penguasa.³³ Sang anak raja, bila telah terpilih untuk dijadikan calon pengganti ayahnya, umumnya melalui pertimbangan dewan adat dan kerabat terdekat, maka sang anak raja itu diwajibkan mencari atau memperkaya pengalamannya dalam kehidupan dunia realitas dari rakyatnya. Ini dimaksudkan, agar dia bila tiba saatnya menjadi seorang pemimpin di masyarakat, dapat mengetahui dengan baik apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari rakyat yang dipimpinya. Tentu saja dalam kaitan ini, dia harus pula memperlihatkan sifat-sifatnya yang terpuji di masyarakat. Seperti antara lain, budinya yang luhur, kualitas agamanya, tingkah lakunya yang dapat menjadi teladan masyarakat, jiwa sosialnya, perilakunya yang positif dalam interaksi sosial di masyarakat.

Sebaliknya, bila ada seorang rakyatnya, atau sekelompok rakyat yang telah terbukti menghina, melakukan pembangkangan, dan tidak patuh pada perintah rajanya dalam ukuran yang tidak keluar dari kesepakatan itu, maka raja dapat menghukum rakyatnya sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya. Apa yang diputuskan oleh sang raja, akan diterima oleh semua lapisan sosial di masyarakat dan dilindungi oleh adat. Dalam konteks "privilege" yang diberikan masyarakat kepada rajanya ini, maka hukuman atau sanksi yang diberikan oleh sang raja ini, tidak memandang buku atau pilih kasih. Apakah dia seorang bangsawan tinggi di masyarakat, apakah dia orang yang terkaya di masyarakat, atau apakah dia seorang pemuka adat atau tokoh masyarakat atau berasal dari keluarga yang terhormat di masyarakat, semuanya harus patuh dan taat pada apa yang telah ditetapkan oleh raja.³⁴

Jadi, dari fakta sejarah ini, kita dapat melihat dan menarik garis lurus, bahwa sistem feodalisme yang hidup di Sulawesi Selatan, dijiwai oleh unsur dan semangat "demokrasi". Raja atau kelompok bangsawan meskipun menduduki posisi sebagai "elit strategis" di masyarakat atau dalam struktur sosial dan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau kekuasaan, tidaklah memiliki kekuasaan yang bersifat "mutlak". Atau, dengan lain perkataan, bahwa raja dan kelompok bangsawan tidak dapat menjalankan sistem politik yang bersifat despotisme. Semua tingkah laku raja, semua kekuasaan raja, telah dibatasi oleh norma sosial dan oleh undang-undang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemerintahan atau dalam kontrak sosial sejak terbentuknya organisasi kenegaraan mereka. Perjanjian pemerintahan itu, telah berlaku selama berabad-abad dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak pernah mengalami perubahan atau disesuaikan dengan keadaan.

Masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun telah hidup dalam sistem feodalisme selama ratusan tahun, tapi sistem feodalisme tidaklah menjadikan kehidupan mereka terikat kepada tradisi yang mematkan atau beku. Juga tidak menyebabkan hidup mereka dimasyarakat dieksploitasi oleh sistem yang berlaku, tidak mematkan unsur kreativitas individu atau mematkan pengembangan daya cipta, dan tidak membuat hati anggota masyarakat tertekan dan diliputi oleh perasaan ketegangan. Kondisi

kehidupan yang demikian ini tercipta, karena kelompok penguasa yang memimpin masyarakat dikontrol langsung setiap kebijaksannya oleh rakyat. Adat dalam kehidupan masyarakat sangat dipatuh, baik oleh the ruling class, the ruling family atau the ruling elite, maupun oleh anggota masyarakat sendiri. Adat, merupakan panduan hidup bagi siapa saja di masyarakat. Itulah sebabnya, adat sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Kemudian, ketika kawasan Sulawesi Selatan secara resmi telah dikuasai oleh Belanda pada abad ke XX bagian pertama, dan pemerintah jajahan Belanda kemudian memperkenalkan dan melaksanakan sistem politik baru, yaitu melaksanakan sistem birokrasi dan administrasi Barat, kehidupan adatpun tidak mengalami perubahan.³⁶ Raja, meskipun telah hilang kekuasaannya secara resmi dengan rakyatnya, karena kekuasaannya dikontrol langsung oleh Residen dan kontroler, tapi tingkah laku sosialnya di masyarakat, kebijakannya di masyarakat, tetap berada dalam siklus adat yang masih hidup dan berakar di masyarakat. Demikian pula sikap rakyat terhadap rajanya, sekalipun ditengah-tengah terdapat kekuasaan Belanda yang mengawasi tingkah laku kedua belah pihak, terutama dalam tingkah laku politik, tapi hati dan perasaan mereka tetap diikat oleh hubungan historis dan sentimen tradisi yang bersumber pada adat rezam mereka. Faktor inilah yang tidak mungkin dipisahkan oleh Belanda.

Jadi, ketika revolusi meletus pada tahun 1945, masyarakat Sulawesi Selatan tidaklah mengalami revolusi sosial seperti yang terjadi di Solo, Aceh dan Sumatera Timur. Pasalnya, rakyat Sulawesi Selatan tidaklah memiliki dendam sosial yang dipendam selama puluhan tahun sebagai konsekuensi dari sistem feodal yang menyengsarakan hidup dan kehidupan mereka, seperti yang dialami oleh masyarakat yang dilanda oleh revolusi sosial tersebut. Hubungan antara raja dan kelompok feodal dengan anggota masyarakat, tetap normal sampai bangsa kita memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu di sini, ada juga terdapat gejolak sosial antara penguasa dengan rakyatnya, tapi sebegitu jauh tidak menyebabkan munculkan peristiwa besar yang mengakibatkan goyahnya hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Lagi pula harus diingat, dimana ada masyarakat yang tidak pernah mengalami gejolak sosial, pasti selalu ada dan tidak mungkin dihindari. Cuma masalahnya, sampai seberapa jauh gejolak sosial itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, gejolak yang besar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tidaklah pernah terjadi hingga mempengaruhi ketenangan hidup masyarakat. Dapat dikatakan semua berjalan normal sampai rakyat di Sulawesi Selatan memasuki zaman kemerdekaan.

Dampak dari adanya hubungan yang normal antara kelompok principality dengan masyarakat, bahwa ketika revolusi meletus selepas kita menyatakan kemerdekaan, rakyat dan kelompok principality bahu membahu dalam membentuk kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan dari invasi militer Belanda yang berusaha menjajah kita kembali. Dalam revolusi itu, kepemimpinan raja, tetap diterima selama revolusi berlangsung. Tidak ada rasa kecurigaan rakyat kepada mereka. Semua berlangsung sebagaimana adanya.³⁷

Kedua, dalam sejarah perjuangan melawan Belanda, baik sejak abad ke XVII,

yaitu ketika melawan VOC, maupun ketika VOC telah runtuh dan kedudukannya digantikan secara langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda, raja-raja dan kelompok bangsawan di Sulawesi Selatan, tidak pernah berhenti berjuang melawan Belanda. Demikian pula rakyat senantiasa mendukung dan membantu secara langsung perjuangan yang dilakukan oleh raja-raja mereka dan kelompok bangsawannya. Sampai periode Andi Mappanyukki dizaman revolusi 1945, raja dan rakyat Sulawesi Selatan terus menerus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Konsekuensi dari perjuangan dari Andi Mappanyuki dan putranya Andi Pangerang Petta Rani di zaman revolusi 1945, Andi Mappanyukki kemudian di tahan oleh Belanda bersama putranya Andi Pangerang Petta Rani dan kemudian diasingkan ke Rantepao. Tahta Andi Mappanyukki sebagai raja Bone yang dilantik oleh Belanda pada tahun 1931, dicopot dari tangannya. Lalu, Belanda mengangkat raja boneka untuk menggantikan Andi Mappanyukki yang dicintai oleh rakyatnya.³⁸

Jadi, dari ikatan hubungan historis yang sangat kokoh antara raja, kaum bangsawan dengan rakyat dalam melawan Belanda, membuat kedua kelompok ini selalu bahu membahu atau melakukan kerja sama yang harmonis dalam kaitannya untuk mengusir penjajah Belanda di tanah air mereka. Kedua kekuatan ini terpadu dalam kehidupan masyarakat, dan makin kuat ikatannya pada saat mereka menghadapi ancaman dari pemerintah jajahan. Ini, yang menyebabkan semangat perlawanan dalam perjuangan melawan Belanda tidak pernah padam dalam suatu periode tertentu.³⁹ Terus hidup dan berkobar di dalam dada mereka untuk suatu ketika akan memberikan pukulan terakhir yang mematikan bagi Belanda. Mereka tidak pernah patuh sepenuhnya atau taat diperintah oleh Belanda tanpa melakukan reaksi terhadap bangsa Belanda yang menjajahnya.

Bukti tentang penolakan kelompok bangsawan untuk diperintah oleh Belanda, dapat kita mulai melihatnya ketika Kerajaan Goa di abad ke XVII akhirnya dikalahkan oleh VOC dalam suatu pertempuran laut yang dahsyat di pantai Makassar. VOC, yang kemudian menduduki kawasan Kerajaan Goa, menempatkan penguasanya untuk memerintah di kawasan Sulawesi Selatan dan sekaligus melakukan kontrol terhadap tingkah laku para raja-raja dengan kelompok bangsawannya.

Reaksi, kemudian timbul dikalangan bangsawan terhadap tindakan Belanda yang mengontrol kehidupan mereka. Akhirnya, dengan didukung oleh anak buahnya atau rakyatnya, kelompok bangsawan ini kemudian meninggalkan Sulawesi Selatan, merantau meninggalkan kampung halamannya untuk terus berjuang melawan Belanda, sambil melakukan perlawanan laut untuk menghambat pelayaran perdagangan kompeni di tempat-tempat yang strategis di bumi Nusantara.⁴⁰ Sebahagian kelompok bangsawan dan pengikutnya itu berlayar ke kawasan Ternate, Tidore dan Kepulauan Maluku, sebahagian ke Kalimantan, dan mungkin bahagian yang terbesar menuju ke pantai-pantai Sumatera dan kepulauan Riau yang sangat strategis dalam dunia perdagangan karena sangat dekat dengan Malaka. Di kawasan-kawasan pantai yang didiami oleh emigran Bugis Makassar yang tidak mau tunduk dan diperintah oleh Belanda itu, kemudian menggalang kesatuan dan mendirikan kekuatan militer. Dari Armada-armada laut yang mereka miliki itu, mereka kemudian melakukan gangguan terhadap kapal-kapal perdagangan Belanda yang dilakukan dengan metode perang Gerilya di lautan. Aksi yang telah diperlihatkan oleh

pejuang-pejuang Bugis Makassar ini, menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi VOC. Adakalanya kapalnya dirampok dan awaknya di bunuh, ada yang dihancurkan dalam pertempuran, dan sebagainya. Guncangan pelayaran ini, merupakan kendala berat bagi Belanda.⁴¹ Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian perjuangan heroik dan militan dari pelaut-pelaut Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan ini, telah dicap sebagai "Bajak Laut".⁴² Padahal, sebenarnya mereka bukanlah bajak laut dalam pengertian yang sesungguhnya. Mereka bertarung dilautan, menyerang armada niaga Belanda, hanya semata-mata untuk menghancurkan kekuatan Belanda yang menjajah tanah air mereka. Tapi kita tidak perlu heran dalam sikap Belanda mencap perjuangan bangsa kita. Sebab, semua pemberontakan politik atau semua bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia dalam melawan Belanda, selalu dicap negatif. Ada yang dicap pemberontak, pengganggu keamanan, dan tidak jarang pula dicap sebagai teroris. Tapi sebaliknya perbuatan Belanda yang kejam dalam mengeksploitasi rakyat Indonesia, tidaklah pernah disadarinya bahwa perbuatan itu sama dengan perbuatan teroris.

Namun, yang menarik untuk disimak dari kelompok emigran Bugis Makassar yang tidak mau diperintah oleh Belanda, adalah kelompok emigran yang menuju ke kepulauan Riau dan Selat Malaka pada abad ke XVII.⁴³ Kelompok ini tidak saja berjaya menguasai lalu lintas perdagangan di kawasan tersebut, sehingga jalur-jalur pelayaran Kompeni dapat dikatakan tidal pernah aman melewati kawasan itu, tapi kelompok emigran ini, telah pula berjaya masuk berperanan dalam struktur politik Kerajaan Johor.⁴⁴ Peristiwa masuknya mereka dalam struktur politik tersebut, dimulai ketika Kerajaan Johor diancam kedaulatannya oleh Raja Kecil dari Siak. Kelompok emigran Bugis Makassar di masa itu, telah menjadi kekuatan yang menentukan di kawasan Semenanjung dan kepulauan Riau.⁴⁵ Mereka, telah memiliki kekuatan militer yang tangguh dan malang melintang di dua kawasan itu. Lalu, ketika Kerajaan Johor terancam kedaulatannya oleh operasi militer dari Kerajaan Siak, maka keluarga Istana Kerajaan Johor kemudian meminta bantuan kepada kelompok emigran Bugis yang dipimpin oleh Daeng Parani berdaudara.⁴⁶

Tentu, dalam permohonan bantuan orang Melayu kepada Daeng Parani, tidak hanya sekedar bantuan saja. Sebab, ini menyangkut masalah militer dan politik. Akhirnya setelah dipertimbangkan oleh Daeng Parani dengan saudaranya, maka permohonan bantuan militer dari keluarga Istana Kerajaan Johor itu, dikabulkan oleh Daeng Parani bersaudara. Cuma, dengan persyaratan bahwa apabila kelompok militer Bugis Makassar itu telah berjaya menghancurkan kekuatan militer Raja Kecil dari Siak, maka Kelompok Militer Bugis diberi hak atau kesempatan untuk memegang posisi dalam struktur politik Kerajaan Johor. Demikianlah, selepas melalui pertarungan militer yang menentukan, akhirnya kelompok Militer Bugis berjaya mengalahkan kekuatan militer Raja Kecil. Perjanjian yang telah disepakati itu langsung dilaksanakan. Dan terciptalah kemudian suatu pemerintahan gabungan Melayu-Bugis.⁴⁷ Dalam pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak, kelompok Melayu yang dipimpin oleh Sultan Mahmud menguasai bidang administrasi, sedang kelompok emigran Bugis menguasai bidang pertahanan atau militer. Atau, orang Melayu yang menjadi Sultan, sedang yang menjadi Perdana Menteri (Yamtuan Muda) adalah orang Bugis Makassar. Namun, yang menarik pula dalam pemerintahan

gabungan itu, bahwa kelompok emigran Bugis Makassar itu kemudian melakukan "politik perkawinan" untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur politik atau kekuasaan Kerajaan Johor.⁴⁸ Oleh karena itu, keturunan raja-raja Melayu (Malaysia) banyak di antaranya yang berasal dari keturunan kelompok emigran Bugis Makassar. Sedang di daratan Semenanjung, orang-orang Bugis Makassar telah berjaya pula mendirikan sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Selangor. Raja pertama, dan keturunannya kemudian adalah berasal dari orang-orang Bugis Makassar. Pengaruh dan peranan mereka di Semenanjung sangat dominan dalam abad ke XVIII.⁴⁹

Akhir dominasi politik dan militer Bugis Makassar di Semenanjung dan Kepulauan Riau, juga ditentukan melalui pertarungan laut yang dahsyat dengan Armada Laut Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Van Braam.⁵⁰ Sedang dipihak keturunan Bugis Makassar, adalah dipimpin oleh Raja Haji.⁵¹ Penguasa Riau yang menjadi lawan dari Laksamana Van Braam ini, adalah produk atau hasil perkawinan Melayu Bugis. Kakek dari Raja Ali Haji, adalah Daeng Kamboja. Jadi Raja Haji adalah generasi ketiga dari kelompok emigran Bugis Makassar yang telah berjaya diperantauan.⁵²

Dendam kesumat masyarakat Sulawesi Selatan yang menjajah tanah air mereka tidak pernah padam sampai akhirnya Belanda kita kalah dalam perang kemerdekaan atau dalam revolusi 1945. Dan yang menjadi penaja dalam pelampiasan dendam ini adalah dari raja-raja mereka, kelompok pemimpin mereka, yang merasa terhina tanah airnya direbut dan dijajah oleh Belanda. Dendam kesumat tersebut, juga tidak terlepas dari budaya Sirik yang mereka miliki.⁵³ Yaitu budaya yang menekankan unsur harga diri dan martabat yang harus dipertahankan oleh setiap orang atau kelompok sosial di masyarakat. Dan kelompok raja-raja Sulawesi Selatan telah memperlihatkan unsur harga diri itu dalam perlawanannya terhadap Belanda sejak abad ke XVII sampai zaman revolusi 1945. Mereka, meskipun mengalami kekalahan berkali-kali dari Belanda, karena faktor persenjataan yang dimiliki oleh Belanda jauh lebih modern, tapi semangat juang mereka tidaklah pernah padam.

Begitulah, perjalanan sejarah kelompok aristokrat Bugis Makassar atau kelompok feodal masyarakat Sulawesi Selatan dalam melakukan perjuangan melawan Belanda. Mereka, tidak saja melakukan perang dengan Belanda di tanah airnya, atau di kampung halamannya, tapi di kawasan lain, atau dimana pun mereka bertemu dengan Belanda mereka selalu bertarung habis-habisan. Soal kalah atau menang adalah soal nanti. Yang penting bagi kelompok aristokrat yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya, adalah menghancurkan kekuatan Belanda pada setiap kesempatan yang ada. Di darat, atau pun di lautan.

Itulah sebabnya, perpaduan rasa antara rakyat dengan raja dan kaum bangsawannya di masyarakat, dapat dikatakan umumnya berjalan normal. Tidak seperti halnya dengan kawasan lain yang dilanda oleh revolusi sosial ketika kita menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Ketiga, dalam babakan terakhir perjuangan mencapai kemerdekaan, kelompok aristokrat Sulawesi Selatan telah berperan sebagai penaja Nasionalisme. Kecuali itu, mereka juga melibatkan diri secara langsung dalam aksi-aksi perjuangan pisik bersama-sama rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelompok aristokrat dalam peranannya sebagai penaja nasionalisme, tidak saja

memberikan berbagai kemudahan, sumbangan dana untuk kepentingan perjuangan, perlindungan politik, tapi juga langsung menjadi pemimpin dalam operasi militer dalam melawan serdadu Belanda. Faktor inilah yang menyebabkan hati rakyat selalu dekat dengan pemimpinnya. Demikian pula hati pemimpin telah manunggal dengan hati rakyat dalam periode perjuangan yang sangat menentukan itu.

Untuk membuktikan argumentasi ini, maka peranan Andi Mappanyukki yang waktu itu masih berfungsi sebagai Raja Bone ke XXXII dengan putranya Andi Pangerang Petta Rani, dapat disimak atau dikaji bahwa kedua tokoh ini memang berperanan sebagai patriotik yang konsekuen pada pendiriannya berpihak kepada republik yang berada dibawah pimpinan Sukarno-Hatta,⁵⁴ Ayah dan anak ini, tanpa pernah memikirkan besar kecilnya resiko dari suatu perjuangan melawan Belanda, bersedia mengorbankan segala-galanya demi perjuangannya untuk tetap setia kepada republik. Tahtanya, yang bagi kelompok aristokrat lainnya mungkin sukar untuk ditinggalkan dalam menjatuhkan pilihan untuk setia kepada republik, tapi untuk Andi Mappanyukki yang patriotik dan nasionalistik ini, bukanlah menjadi kendala dalam mendukung perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian pula dengan kebebasannya sebagai manusia yang memiliki atribut feodal dan status puncak di masyarakat, bukanlah merupakan masalah baginya untuk tetap konsekuen dalam perjuangannya. Penangkapan terhadap dirinya bersama putranya di zaman revolusi karena konsekuen setia pada republik, membuktikan kepada kita betapa besar rasa cintanya kepada tanah air dan bangsanya. Dia, dengan putranya Andi Pangerang Petta Rani, memiliki perasaan yang membaja dan keyakinan yang kokoh tak tergoyahkan bahwa, suatu ketika kemenangan akhir dari republik pasti akan tercapai. Sikap mental yang bagaikan batu karang ini, menyebabkan dia bersama putranya tidak pernah goyah imannya, tidak pernah goyah kesetiaannya terhadap prinsip perjuangannya untuk tetap berdiri dibelakang republik.⁵⁵

Bone, yang menjadi kawasan kekuasaannya, telah dijadikan salah satu pusat gerakan nasionalisme yang penting untuk kawasan Sulawesi. Dari kawasan Bone inilah semua kegiatan dalam konteks menghimpun gerakan perjuangan rakyat menjelang revolusi 1945 digerakkan. Kemudian, dampaknya memang hebat, karena dari Bone, kemudian pengaruh dari gerakan itu tersebar luas di kawasan-kawasan kekuasaan para feodal lainnya. Kharisma dan kewibawaan Andi Mappanyukki dikalangan kelompok feodal tidaklah perlu diragukan lagi. Dia, secara tidak resmi menjadi pemimpin dikalangan penguasa-penguasa feodal di Sulawesi Selatan. Dengan posisinya ini, Andi Mappanyukki dapat pula dikatakan sebagai "tokoh sentral" dikalangan kaum aristokrat. Gagasan dan nasihatnya terhadap kelompoknya, umumnya didengarkan dan tentu saja di ikuti.⁵⁶ Ini, yang menyebabkan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan Sulawesi umumnya, memberikan kepercayaan kepadanya sebagai pemimpin organisasi Sudara,⁵⁷ atau yang dikenal di masyarakat dengan sebutan, Sumber Darah Rakyat. Organisasi perjuangan ini terdiri atas :

| | |
|---------------------|------------------------|
| Ketua Umum | : Andi Mappanyukki |
| Ketua (operasional) | : Dr. GSSJ. Ratulangi |
| Ketua Pusat | : Lanto Daeng Pasewang |

| | |
|----------------------------|--|
| Majlis Pendorong Pusat | : Nadjamuddin Daeng Mallewa dan Andi Maddusila Daeng Paraga |
| Kepala bahagian Umum | : M.A. Pellupessy |
| Kepala bahagian Usaha | : A.N. Hadjarati |
| Kepala bahagian Pendidikan | : Andi Wahab Tarru |
| Komando Pusat | : G.R. Pantouw, H. Muh. Tahir, M. Sewang Daeng Muntu dan Mr. S. Binol. ⁵⁸ |

Kemudian, dalam tahun 1945 itu juga, telah dibentuk cabang-cabangnya di kawasan-kawasan lain. Di kawasan Pare-Pare, Barru, Sidenreng, Rappang, Mandar dan Pinrang, diketuai oleh Andi Bau Massepe dan untuk kawasan Bone, Wadjo, Soppeng, diketuai oleh Andi Pangerang Petta Rani.⁵⁹

Jadi, bila kita menyimak susunan personalia dari organisasi sudara itu, maka jelas terlihat bagaimana peranan kelompok aristokrat Sulawesi Selatan dalam organisasi perjuangan mencapai kemerdekaan. Mereka itu, telah melebur dan manunggal dengan lapisan-lapisan lain di masyarakat untuk menggalang kesatuan demi kemerdekaan bangsa. Dalam organisasi ini, tidak lagi dikenal secara formalistis atribut feodal, jarak sosial berdasarkan status, atau diferensiasi sosial. Kita lihat saja, Andi Mappanyukki dengan Dr. GSSJ. Ratulangi, atau Nadjamuddin Daeng Mallewa dengan MA. Pellupessy, dan G.R. Pantouw dengan M. Sewang Daeng Muntu, semuanya membaaur menjadi satu, bahu membahu menggerakkan rakyat untuk mencapai kemerdekaan nasional. Mereka, dipertemukan oleh satu tujuan bersama, yaitu : Kemerdekaan Nasional.

Namun, yang menarik lagi dari peranan kelompok aristokrat ini, adalah didirikannya "Lembaga Latihan Kenegaraan" di ibu kota Kerajaan Bone, Watampone.⁶⁰ Tokoh intelektual yang dipercayakan memimpin lembaga ini, adalah Mr. Tadjuddin Noor. Lembaga yang ditaja oleh Andi Mappanyukki ini, pada hakikatnya adalah lembaga pendidikan politik bagi angkatan muda yang dipersiapkan untuk menduduki posisi dalam dunia pemerintahan. Ini, telah menunjukkan betapa masyarakat Sulawesi Selatan telah mempersiapkan dirinya, meskipun masih dalam tahapan permulaan, untuk menyongsong zaman kemerdekaan. Mereka, memiliki kesadaran bahwa, kemerdekaan yang tidak lama lagi akan diperoleh melalui perjuangan, memerlukan tenaga muda yang terampil untuk pembangunan bangsa. Atas dasar inilah Andi Mappanyukki tanpa keraguan telah mempelopori berdirinya Lembaga Latihan Kenegaraan di Watampone. Dari lembaga ini pulalah diharapkan lahirnya tenaga angkatan muda yang dapat mengisi kemerdekaan yang saat itu masih diperjuangkan habis-habisan. Dana untuk membiayai lembaga ini, jelas dari Andi Mappanyukki dengan bantuan masyarakat. Mereka semua bersedia memberikan pengorbanan, sumbangan materi demi tercapainya cita-cita perjuangan bangsa.

Adalah menarik untuk mengemukakan di sini argumentasi dari Ide Anak Agung Gde Aung⁶¹ tentang siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Pertanyaan ini muncul dari Dr. Ratulangi menjelang keberangkatannya ke Jakarta untuk memenuhi undangan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Dalam konteks ini, menurut Anak Agung, maka Dr. Ratulangi kemudian berkonsultasi dengan Lanto Daeng Pasewang dan kemudian

bertanya kepada Lanto, "Siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan? Apakah golongan raja-raja (kelompok aristokrat) atau golongan pemuka politik? Lanto Daeng Pasewang selepas mendengar pertanyaan dari Dr. Ratulangi itu, maka dengan tegas dia menjawab, "yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, adalah golongan bangsawan."⁶²

Dari fakta sejarah yang diperlihatkan oleh Anak Agung tentang kelompok mana yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, maka terlihatlah dengan jelas di sini, betapa peranan yang dibawakan oleh kelompok aristokrat dalam mencari dukungan masyarakat, dalam menyebar luaskan pengertian kemerdekaan bagi masyarakat, dan dalam usaha menggalang persatuan nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dari rencana Belanda untuk menjajah kita kembali. Hasil konsultasi antara Lanto Daeng Pasewang dengan Dr. Ratulangi, merupakan masukan yang sangat berharga bagi Dr. Ratulangi selanjutnya dalam menentukan kebijakan politik di kawasan ini. Sebab, seandainya dia tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Lanto Daeng Pasewang sebelum dia diangkat menjadi Gubernur oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka tentu perjalanan sejarah kawasan ini kemungkinan akan lain bentuknya. Mungkin terjadi konflik antara kelompok sosial di masyarakat, dan tidak tertutup pula kemungkinan akan menimbulkan berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat sehingga kesatuan nasional mengalami kendala. Syukurlah, hal yang demikian ini tidak sampai terjadi. Sebab, hasil konsultasi Dr. Ratulangi dengan Lanto Daeng Pasewang itulah yang menjadi dasar kebijakan yang dilaksanakan oleh Dr. Ratulangi di Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, penguasa militer Jepang yang berkedudukan di Makassar, Nishisima,⁶³ mengirim undangan kepada Dr. Ratulangi untuk menghindari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang akan diadakan di Jakarta. Dr. Ratulangi, setelah menerima undangan tersebut, kemudian melakukan konsultasi dengan para nasionalis di Makassar tentang siapa yang sebaiknya akan dikirim untuk menghadiri sidang yang sangat penting untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia itu. Menurut M. Saleh Lahade,⁶⁴ pertemuan dikalangan nasionalis Sulawesi itu setelah mempertimbangkan dengan saksama, maka akhirnya diputuskan untuk mengirim, Dr. Ratulangi sebagai ketua rombongan, Mr. Zainal Abidin sebagai sekretaris, Andi Pangerang Petta Rani dan Sultan Daeng Raja sebagai anggota. Para wakil dari Sulawesi Selatan ini, merupakan pencerminan kesatuan kekuatan sosial politik di Sulawesi pada masa itu. Maksudnya, pihak kelompok aristokrat diwakili oleh Andi Pangerang Petta Rani dan pihak intelektual atau pimpinan politik diwakili oleh Dr. Ratulangi. Kombinasi dari tim Sulawesi ini menarik untuk disimak, karena peranan kelompok aristokrat dan kelompok intelektual dalam revolusi 1945 di Sulawesi merupakan kelompok pemimpin yang langsung terlibat dalam memimpin rakyat berjuang melawan invasi militer Belanda. Kehadiran kedua kelompok pemimpin ini di masyarakat, telah diterima oleh rakyat Sulawesi dengan ikhlas. Ini, yang menyebabkan perintah yang keluar dari kelompok pemimpin mereka ketika melawan Belanda dipatuhi dengan sebaik-baiknya.

Setelah pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tanggal 19 Agustus 1945, Dr. GSSJ. Ratulangi telah diangkat oleh Presiden

Soekarno sebagai Gubernur Sulawesi yang pertama. Selepas Dr. Ratulangi menduduki posisi sebagai pemimpin formal di Sulawesi, maka langkah kebijakan pertama yang dilaksanakannya adalah menghimbau semua kekuatan sosial yang terdapat di Sulawesi, khasnya kawasan Sulawesi Selatan yang menjadi pusat pemerintahannya. Ini, penting dilakukan dalam tahap pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur di Sulawesi. Sebab, meskipun dia telah secara resmi diangkat oleh pemerintah RI sebagai Gubernur, maka tidak dapat dibayangkan banyak kendala yang akan dihadapinya bila tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari semua lapisan sosial di masyarakat. Untuk itu, Dr. Ratulangi kemudian melaksanakan hasil konsultasinya dengan Lanto Daeng Pasewang, yaitu mengadakan pendekatan dengan kelompok Aristokrat yang mempunyai pengaruh dan kewibawaan yang berakar di masyarakat.

Dr. Ratulangi, kemudian memutuskan Lanto Daeng Pasewang dan A.N. Hadjarati, untuk ditugaskan menghubungi Andi Mappanyukki, Andi Bau Massepe dan Andi Pangerang Petra Rani. Tiga tokoh aristokrat itu setelah dihubungi oleh Lanto Daeng Pasewang, berjanji untuk memenuhi harapan dari Gubernur Dr. Ratulangi. Begitulah, ketiga tokoh aristokrat itu kemudian menghubungi kelompok aristokrat lainnya untuk memberikan penjelasan dan sekaligus mengajak mereka untuk mendukung republik, khasnya Gubernur Dr. Ratulangi, dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugas itu tidaklah ringan, sebab walau bagaimanapun tidak seluruhnya kelompok aristokrat itu yang senada dan sehaluan pikiran dan pendiriannya dengan Andi Mappanyukki, Abdullah Bau Massepe dan Ani Pangerang Petra Rani. Tentu, ada yang masih diliputi oleh keraguan akan terjadinya perubahan zaman yang sangat mendadak itu, ada yang masih membayangkan statusnya yang enak di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi, pada akhirnya sekelompok kecil dari aristokrat itu yang mungkin masih kekurangan informasi atau tidak terjadi dialog langsung dengan kelompok nasionalis, akhirnya menyatakan mendukung republik dan Gubernur Dr. Ratulangi. Dampak positif dari usaha tiga aristokrat yang melakukan propaganda politik itu, memang terlihat di masyarakat. Ini, dapat disimak dari sikap rakyat yang berada di bawah pengaruh atau kekuasaan dari kelompok feodalis itu terhadap perjuangan. Setiap kali diadakan rapat raksasa untuk menyatakan tekad mendukung Soekarno atau RI, rakyat berduyung-duyung mendatangnya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, rakyat meneriakkan semboyan-semboyan perjuangan. Tampaknya, budaya panutan dalam masyarakat Sulawesi di zaman perang kemerdekaan masih sangat kuat berperan dalam kehidupan mereka. Ini dapat dibuktikan dari tingkah laku rakyat yang patuh sepenuhnya kepada apa yang dinyatakan dan apa yang diperintahkan oleh para bangsawannya. Kelompok bangsawan yang menjadi panutan itu, menerima pengabdian total para pendukungnya dalam kaitan memberikan dukungan penuh kepada republik. Jadi, dengan demikian dapat dinyatakan di sini, bahwa strategi Dr. Ratulangi untuk merangkul kelompok aristokrat, seperti yang disarankan oleh Lanto Daeng Pasewang, telah berjaya mencapai sasarannya dengan memuaskan.

Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi, kemudian menyusun personalia organisasi pemerintahannya. Dengan organisasi pemerintahan yang masih sederhana ini, sang Gubernur melakukan tugas pemerintahan dalam suasana revolusi dari ancaman Belanda yang ingin menjajah kita kembali. Adapun susunan pemerintahan

yang dibentuk oleh Dr. Ratulangi adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------------|---|
| Gubernur | : Dr. G.S.S.J. Ratulangi |
| Sekretaris | : Mr. Andi Zainal Abidin |
| Wakil Sekretaris | : F. Tobing |
| Biro Umum | : Lanto Daeng Pasewang |
| Biro Ekonomi | : Mr. Tadjuddin Noor |
| Biro Penerangan | : Manai Sophian |
| Biro Pemuda | : Siramanual Daeng Saellan |
| Pembantu-pembantu | : A.N. Hadjarati G.R. Pantouw Sam Supardi Pondaag Dr. Syafri M. Saleh Lahade ⁶⁵ |

Dengan susunan pengurus yang masih sederhana itulah, Gubernur Dr. Ratulangi menjalankan tugasnya di zaman revolusi. Belum ada anggaran belanja negara yang jelas, belum memiliki pengalaman sebagai birokrat republik, belum ada proyek, yang ada dalam diri mereka, adalah semangat juang yang militan untuk mengabdikan kepada revolusi 1945. Inilah romantika revolusi, dimana setiap orang, terutama kelompok pemimpinya hanya mengenal pada pengabdian terhadap negara dan bangsa untuk mengisi kemerdekaan yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945. Mereka semua di masa itu, tidak mengharapkan apa-apa dari negara, bahkan diantara mereka ada yang justru mengorbankan hartanya untuk membiayai lancarnya mekanisme administrasi yang mereka pimpin. Namun, itulah profil perjuangan dari bangsa kita di zaman revolusi 1945.

Sisi lain yang dapat dijadikan pula fakta mengenai peranan aktif kelompok aristokrat dengan bekerja sama dengan kelompok lain di masyarakat dalam kaitan menghimpun kekuatan melawan Belanda, adalah yang menyangkut berdirinya laskar-laskar perjuangan di Sulawesi Selatan. Kawasan atau afdeling (istilah zaman Belanda) yang salah satu dapat dijadikan contoh atau bukti di sini, adalah kawasan Goa, atau lebih tepat daerah Polombangkong (adat gemeenschap) yang pada zaman revolusi berpenduduk sekitar 45.000 jiwa.⁶⁶ Menurut manuskrip dari Makkaeraeng Daeng Mandjarungi, ketika masyarakat Polombangkong mendengar berita bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, maka sekitar bulan Agustus 1945, maka pimpinan masyarakat (adat) menunjuk tiga orang untuk menyebar luaskan berita proklamasi itu di masyarakat, ketiga orang tersebut, adalah :

1. Makkaeraeng Daeng Mandjarungi
2. Sjamsuddin Daeng Ngerang
3. Madinah⁶⁷

Selepas ketiga orang itu menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan dukungan dari seluruh anggota masyarakat, maka pimpinan adat pun melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Karaeng Polombangkong. Dengan dihadiri oleh sekitar 150 tokoh masyarakat, dikeluarkanlah keputusan dari rakyat Polombangkong yang mendukung republik dan tidak mau dijajah lagi oleh Belanda.⁶⁸ Rapat yang diadakan pada tanggal 2 September itu, dipimpin langsung oleh Karaeng Polombangkong, dan

dihadiri pula oleh, pegawai atau tokoh adat, kelompok Sjarat atau Naib, pemimpin-pemimpin perkumpulan (organisasi) dan orang-orang terkemuka lainnya. Rapat revolusi itu, kemudian mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

*"Mempertabankan mati-matian akan kemerdekaan tanah air kita yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sebidup semati dengan Republik Indonesia."*⁶⁹

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan masyarakat Polombangking yang dipimpin oleh rajanya sendiri, maka pada tanggal 16 Oktober 1945, didirikanlah sebuah organisasi perlawanan rakyat yang mereka beri nama "Gerakan Muda Bajeng" yang dipimpin oleh Karaeng Polombangking. Anggota-anggota dari organisasi "pra militer" ini, terdiri dari guru-guru sekolah desa, para petani, para keluarga aristokrat, para pemuka adat, para ulama atau pemimpin agania, para anak sekolah yang masih muda usia, dan lain-lain. Pemdek kata, terdiri dari semua lapisan sosial dari masyarakat Polombangking. Sejak berdirinya organisasi gerakan muda bajeng itu, maka merekalah yang menjaga ketertiban dan keamanan selama belum ada polisi republik Indonesia. Sebenarnya ada juga polisi, tapi mereka itu berada dibawah koordinasi NICA. Jadi, sama saja artinya tidak ada, sebab menjadi bahagian dari kekuatan militer Belanda. Pasukan dari gerakan muda bajeng inilah di bulan-bulan pertama revolusi menjadi pengawal rakyat Polombangking dan daerah sekitarnya. Dana logistik dari organisasi ini dipikul oleh rakyat Polombangking dan Karaeng Polombangking. Ini, yang menyebabkan organisasi itu berkembang terus menjadi besar dan pengaruhnya terasa sampai kekota Makassar. Pasukan ini dalam tahun 1946, mulai melancarkan operasi kepinggir-pinggir kota Makassar dengan tujuan mengganggu posisi militer Belanda atau menyerang patroli Belanda yang sedang lengah.

Namun, oleh pihak serdadu dan polisi Belanda (NICA), perjuangan yang heroik dari gerakan muda bajeng ini, telah dicap sebagai, kriminalitas, pemberontak, pengganggu keamanan, perampok, dan teroris. Tuduhan ini, memang sangat menyakitkan hati masyarakat Polombangking. Pasalnya, organisasi gerakan muda bajeng ini, adalah dipimpin langsung oleh rajanya, yaitu Karaeng Polombangking. Akan tetapi tuduhan dan fitnah itu, justru memperkuat tekad masyarakat Polombangking untuk bersatu padu menghimpun kekuatan dalam melawan Belanda. Operasi militer yang dilancarkan oleh Belanda pada tahun 1946 - 1947, terutama yang dipimpin oleh Kapten Westerling⁷⁰ yang terkenal dengan pasukan NICAnya menyebabkan timbulnya banyak korban yang berjatuh dari pasukan gerakan bajeng muda. Karaeng Polombangking akhirnya memutuskan untuk bergerilya di hutan-hutan dan daerah pegunungan. Dari hutan dan gunung inilah mereka melakukan serangan balasan dengan metode gerilya.

Persenjataan dari laskar rakyat ini, cukup memprihatinkan. Mereka, hanya mempergunakan persenjataan tradisional, seperti badik atau keris pusaka, tombak, parang, bambu runcing, dan sejumlah kecil senjata api yang berhasil mereka rampas atau yang dapat mereka beli sendiri. Dengan persenjataan yang sederhana itulah mereka melakukan perlawanan yang militan. Akan tetapi, satu hal yang tidak dimiliki oleh serdadu Belanda yang juga banyak terdiri dari bangsa kita yang berhasil di beli oleh Belanda, adalah keimanan dan semangat perjuangan yang pantang menyerah. Kefanatikan mereka dalam pertempuran, telah diakui sendiri oleh serdadu Nica dan

penduduk kota Makassar. Seperti, mendaki dan menaiki Tank Belanda hanya dengan granat ditangan sambil menyerukan nama Tuhan, "Allahu Akbar, menembak sambil berteriak "Merdeka" dengan posisi berdiri tanpa berlindung, bertengger di atas pohon sambil menembak kebawah atau kearah tank Belanda, menyerang pos Belanda/polisi hanya dengan persenjataan yang sederhana dan diperkuat mentalnya dengan "jimat" atau ayat-ayat suci Al Qur'an dan lain-lain. Inilah spirit revolusi yang telah membakar jiwanya dan menyebabkan mereka yang gugur itu sama sekali tidak mempersoalkan jiwanya menjadi mangsa peluru Belanda. Apa yang ada dalam hati dan benaknya, adalah mati "sahid" sebagai pejuang republik. Memang menakjubkan spirit revolusi yang telah membakar jiwanya. Inilah potret pejuang-pejuang kita di zaman revolusi yang tidak mengenal pamrih dalam perjuangannya. Gerakan muda bajeng, kemudian berganti nama menjadi "Lipang Bajeng" pada 2 April 1946, dan terkenal di masyarakat dengan nama "Pasukan Lipang Bajeng". Laskar ini, kemudian terbagi dua pimpinannya, yaitu :

1. bidang organisasi diketuai oleh **Makkaraeng Daeng Mandjarungi**,
2. bidang militer diketuai oleh **Ranggong Daeng Romo**.

Pada tanggal 28 Pebruari 1947,⁷¹ Ranggong Daeng Romo, telah gugur dalam pertempurannya yang heroik melawan serdadu Nica. Kegugurannya, mungkin sebagai konsekuensi dari keberaniannya yang tidak memperhitungkan jiwanya dibarisan paling depan dari anak buahnya. Bukan dibelakang meja menyusun strategi, bukan pula berlindung di belakang pengawal atau anak buahnya, tapi di paling depan sambil berteriak "Allahu Akbar" kemudian di susul dengan pekikan "Merdeka" Daeng Romo menyerang posisi Belanda yang memiliki persenjataan lengkap. Dia gugur sebagai pahlawan bangsa. Kemerdekaan yang dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan sekarang ini, adalah bahagian dari pengorbanan jiwanya beserta ribuan anak buahnya dalam perlawanannya yang heroik melawan pasukan Nica yang berusaha menghancurkan republik.

Sisi lain yang kiranya patut diketahui tentang Laskar Lipang Bajeng ini, bahwa masyarakat Polombangking tidak menyabot kesatuan perjuangan rakyat mereka dengan nama "Badan Keamanan Rakyat" atau nama-nama lain yang biasanya dipergunakan, tapi kesatuan perjuangan mereka disebut "Parti Pemberontak".⁷² Maksud dari penggunaan nama itu, adalah untuk menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Polombangking, merupakan pemberontakan terhadap pendudukan bangsanya yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka melakukan pemberontakan terhadap kelaliman serdadu Nica, mereka berontak terhadap usaha Belanda menjajah tanah airnya kembali, dan mereka memberontak demi mempertahankan kedaulatan bangsanya. Jadi, pengertian pemberontak di sini, berbeda dengan pengertian yang kita jumpai di masyarakat sekarang. Pemberontak di zaman revolusi 1945, merupakan manifestasi dari perasaan patriotik rakyat dan berkaitan dengan spirit atau jiwa nasionalisme. Atau, dengan perkataan lain, bahwa pemberontakan adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari invasi militer Belanda. Sedang pengertian pemberontakan sekarang, adalah umumnya bersifat negatif. Seperti umpamanya, melawan pemerintah, melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang negara, menyabot usaha pembangunan dari pemerintah, dan lain-lain.

Aktivitas perjuangan dari Partai Pemberontak Lipang Bajeng, sampai menjelang perjanjian Renville, telah memperlihatkan grafik yang makin meningkat. Operasi militer yang dilancarkan oleh Lipang Bajeng tidak saja dilakukan disekitar kawasan afdeling Goa, tapi juga telah melakukan operasi kekota Makassar. Jadi, mereka telah melakukan gerakan ofensif militer. Ini, sangat merepotkan serdadu Nica yang berpusat di Makassar. Mereka, merasa ngeri bila melakukan patroli di waktu malam hari, terutama di kawasan pinggiran kota. Pasalnya, para parti pemberontak Lipang Bajeng ini terkenal sangat fanatik bila mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan NICA. Kawasan-kawasan lain di Sulawesi Selatan, juga tidak ketinggalan mendirikan parti-parti pemberontak, seperti Partai Pemberontak Keris Muda di Mandar, bahkan di kota Makassar sendiri didirikan Partai Pemberontak yang dipimpin oleh Ali Malaka dan organisasinya diberi nama "Pusat Pemuda Nasional", dan lain sebagainya. Akhirnya, pada tanggal 17 Juli 1946 didirikanlah organisasi gabungan para parti pemberontak di Sulawesi Selatan. Ini, adalah atas usaha penaja dari Muh. Riri Amin Daud dari Partai Pemberontak Keris Muda dari Mandar dan Ali Malaka dari Makassar, serta dari Lipang Bajeng sendiri. Organisasi gabungan itu, mereka beri nama : **Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi**, yang disingkat "LAPRIS".⁷³ Dalam wadah organisasi Lapris inilah bergabung semua organisasi perjuangan rakyat Sulawesi Selatan yang jumlahnya puluhan. Selain itu, perlu diketengahkan pula bahwa rakyat Polombangkong pada tanggal 14 Desember 1946, telah mendirikan organisasi untuk mempertahankan republik dengan nama "Komite Persiapan Pemerintah Republik Indonesia".⁷⁴ Tujuannya, untuk membentuk organisasi pemerintahan sementara dalam mengisi kemerdekaan bila pemerintahan telah dikuasai oleh pasukan NICA atau Negara Republik Indonesia Timur, ciptaan van Mook. Dengan demikian, dapat dikatakan di sini, bahwa kelompok patriot Polombangkong telah bergerak sangat cepat dalam usahanya membela Republik dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka, telah berfikir tentang alternatif perjuangan menghadapi NICA. telah memiliki pandangan politik yang jauh kedepan dalam kaitan sasaran perjuangan yang hendak dicapai. Padahal bila kita menyimat kawasan Polombangkong ini, hanyalah merupakan kawasan pedesaan yang tidak memiliki berbagai fasilitas di zaman revolusi. Demikian pula tidak memiliki kelompok intelektual dalam pengertian pemikir kenegaraan. Di sinilah terletak keunikannya, karena kelompok pejuang Polombangkong yang dipimpin oleh raja dan para aristokratnya, sudah memikirkan masalah yang menyangkut dunia pemerintahan. Namun, ini adalah suatu kenyataan sejarah dari potret kelompok pejuang di kawasan Polombangkong.

Setelah Lapris terbentuk, maka gerakan perjuangan rakyat Sulawesi makin memperlihatkan ofensifnya. Akibatnya, pasukan NICA telah mulai kewalahan menghadapinya. Akhirnya, didatangkanlah seorang algojo yang berdarah dingin ke Sulawesi Selatan. Algojo itu, adalah Kapten Westerling yang terkenal sebagai pemimpin APRA. Dalam bulan Desember 1946, Westerling mulai melancarkan operasinya dengan sasaran pertamanya di kawasan Polombangkong dan disusul kemudian diberbagai kawasan lainnya di Sulawesi Selatan. Sasaran operasi militer Westerling ke Polombangkong, adalah karena kawasan ini dianggap paling berbahaya karena merupakan pusat pejuang-pejuang berkumpul atau yang terbanyak dan

sekaligus merupakan tempat untuk melakukan konsolidasi.

Namun, apa yang sesungguhnya yang menjadi korban terbanyak dari keganasan kapten Westerling selama operasi militernya berlangsung di Sulawesi Selatan, membunuh rakyat yang tidak bersenjata dan tidak berdosa.⁷⁵ Rakyat yang tidak berdosa itu ditangkapi dari rumahnya pada siang hari. Dan kemudian mereka giring ke tempat-tempat tertentu untuk dihabisi jiwanya. Tapi, adapula yang dibunuh ditempat, dalam perjalanan, atau di lapangan terbuka, dan ganasnya lagi, karena sebelum rakyat itu dibunuh disiksa dahulu agar dapat menunjukkan siapa pejuang dan dimana markasnya. Selepas itu, mereka lalu dibunuh semuanya dan dikubur secara massal. Jadi, korban yang terbanyak justru dari kelompok rakyat biasa yang tidak berjuang, seperti petani, orang tua, perempuan, guru-guru dan lain-lain. Sedangkan kelompok pejuang tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan rakyat biasa secara keseluruhan. Pasalnya, para pejuang ini sukar mereka jebak dan sukar mereka tangkap karena meskipun terjepit selalu melakukan perlawanan yang heroik. Itulah sebabnya korban jiwa dari operasi Westerling sangat banyak, karena yang terbanyak mereka bantai adalah rakyat yang tidak berdosa atau tidak bersenjata.

Westerling, dan pasukannya yang juga banyak terdiri dari orang-orang bumiputra yang berhasil dibeli oleh NICA, selama menjalankan operasinya, juga melakukan perampokan terhadap harta benda rakyat. Celakanya, karena anak buahnya yang berasal dari kelompok bumiputra itu, yang oleh rakyat disebut "Belanda Hitam", adakalanya lebih ganas menyiksa rakyat dan membunuhnya sekaligus ketimbang anak buah lainnya yang berkulit putih. Menurut pengakuan dari keluarga yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan dari operasi Westerling itu, bahwa rakyat sebahagiannya lebih takut kepada anak buah Westerling yang mereka sebut Belanda Hitam itu, dari pada anak buah Westerling yang berkulit putih. Konsekuensi dari operasi militer Westerling ini, maka kehidupan rakyat mengalami kesengsaraan dalam hidupnya dan makin bertambah miskin. Betapa tidak, mereka telah kehilangan anggota keluarganya, harta benda dirampok dan sebahagiannya lagi rumahnya dibakar oleh pasukan Westerling. Inilah penderitaan rakyat selama periode keganasan pembunuhan massal yang dilakukan oleh Kapten Westerling dengan anak buahnya yang sebahagian juga berasal dari kelompok pribumi. Banyak diantara korban itu yang tidak ditemukan lagi kuburannya karena dimakamkan secara massal dalam sebuah liang lahat yang digali oleh rakyat sendiri sebelum mereka dibunuh secara mengerikan dan tidak berperikemanusiaan. Tidak terhitung keluarga yang hancur berantakan, dan tidak terhitung pula jumlah harta benda yang telah menjadi korban keganasan operasi itu. Namun, semua pengorbanan itu tidak sia-sia, karena akhirnya kita telah berjaya mempertahankan kemerdekaan.

Demikianlah beberapa catatan penting yang telah terpatri dalam sejarah perjuangan perlawanan rakyat Sulawesi di Polobangkang di awal revolusi 1945. Kawasan ini, menonjol kedepan di zaman perjuangan, karena kelompok aristokratnya atau raja-raja lokal di sekitar afdeling Goa, tampil sebagai penaja revolusi, penaja dalam gerakan perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebagai salah satu pusat gerakan militer atau pusat konsolidasi kelompok gerilya di Sulawesi Selatan, kawasan Polobangkang ini memang suatu

pilihan yang tepat. Rakyatnya, yang dipimpin oleh keturunan raja Goa memiliki tradisi sejarah perjuangan yang pantang menyerah dalam menghadapi Belanda. Sepanjang periode penjajahan Belanda, mereka bertarung terus melawan serdadu Belanda. Jika tidak dalam pertempuran atau pertarungan yang terbuka, seperti yang dilakukan oleh Ayah Andi Mappanyukki Raja Goa ke XXXIV yang bernama dan bergelar "I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lambangperang Sultan Husain Tu Lengkuri Bundu'na", maka perlawanan itu dilakukan dalam bentuk penyerangan kecil-kecilan terhadap posisi serdadu Belanda di masyarakat. Atau, melakukan pemberontakan dalam bentuk "pemberontakan petani". Kecuali itu, yang patut diperhatikan pula, bahwa kawasan Polombangking, juga memiliki tempat-tempat yang strategis seperti bukit-bukit untuk menyerang serdadu Belanda secara mendadak. Kawasan hutan yang lebat dan daerah pegunungan, merupakan alternatif terakhir yang digunakan oleh kelompok perlawanan rakyat untuk bersembunyi dari pengejaran serdadu Belanda. Kemudian, bila tiba saatnya, mereka keluar lagi dari persembunyiannya untuk melakukan pertarungan.

Para hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya pada bahagian terakhir pidato ini, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan membiayai pendidikan saya, hingga akhirnya saya dapat bermanfaat untuk bangsa.
2. Prof. dr. Moeliono S. Trastotenojo, selaku Rektor Universitas Diponegoro. Bagi saya, beliau tidak saja sebagai atasan yang simpatik, tapi juga sebagai pemimpin yang banyak memberikan dorongan dan bantuan dalam pengembangan karier saya di Universitas Diponegoro. Terutama ketika saya dalam tarap penyelesaian studi Ph. D University Malaya, Malaysia. Di bawah kepemimpinan beliau saya berjaya mencapai pangkat Guru Besar.
3. Prof. Sudarto, SH. alm. Beliau tidak saja banyak membantu saya dalam memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi, tapi juga dalam usaha membantu saya untuk keluar dari kemelut kehidupan keluarga yang pernah saya alami sekitar tahun 1977. Dia, berperanan sebagai "spiritual adviser" dalam kehidupan pribadi saya. Nasihatnya yang lembut, hingga saat ini tetap berkesan di hati saya dan tidak akan mungkin saya lupakan.
4. Prof. Dr. Harsja W Bachtiar dan Dr. Taufik Abdullah yang mengirim saya melanjutkan studi di Malaysia.
5. Dr. Lance Castle, yang menjadi pembimbing saya ketika mengikuti program Ilmu-ilmu sosial di Aceh.
6. Prof. Dr. Khoo Kay Kim dan Prof. Dr. S. Husin Ali, yang merupakan promotor saya di University Malaya. Di bawah bimbingan beliau saya telah berjaya meraih gelar Ph. D.
7. Prof. Dr. A. Sartono Kartodirjo dan Prof. Dr. Ibrahim Alfian, guru saya ketika belajar di Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1959 - 1965).
8. Dekan, pembantu dekan, rekan ketua jurusan, para pegawai administrasi Fakultas Sastra UNDIP. Terima kasih atas kerja sama yang anda telah berikan

selama ini. Juga, kepada Panitia penyelenggara pengukuhan ini, terima kasih atas bantuan yang sudah semua telah berikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan yang telah saudara berikan.

9. Untuk istri saya "Andi Harmoniar" yang setia dan tabah. Inilah tebusan yang kuberikan kepadamu atas kesetiaanmu mendampingi saya selama ini. Karya Ilmiah ini, saya persembahkan untukmu sebagai tanda kesetiaanmu merawat diriku. Terutama ketika saya nyaris frustrasi dalam menghadapi cobaan berat pada waktu menyelesaikan desertasi dan ketika saya menderita sakit serius dua tahun yang silam. Sukar untuk menemukan istri yang setia dan tabah di dunia ini. Namun di dalam dirimu aku telah menemukannya. Semogalah Tuhan tidak hanya mempersatukan kita di dunia, tapi juga diakhirat kelak, tentu termasuk juga anak-anak kita.
10. Kepada para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan Rektor Universitas Diponegoro dalam upacara tradisi akademik ini.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Catatan :

1. Lihat, Hamid Abdullah, *Revolusi dan Perubahan Sosial di Sumatra Timur*, Makalah Seminar Sejarah Revolusi MSI cabang Yogyakarta, 1988.
2. I b i d.
3. Lihat, Hamid Abdullah. *Perubahan Sosial dan Revolusi 1945*, Harian Suara Merdeka Semarang, 18 Agustus 1988.
4. Hamid Abdullah, Op.Cit, hal. 14.
5. Lihat, W.F. Wertheim, *Indonesia Society In Transition*, Uitgevermaatschappij A. Manteau N.V. - Brussel, 1959, hal. 280 - 305.
6. Lihat, Anthony Reid, *The Blood of the People*, OUP, Kuala Lumpur, 1969.
Lihat pula, Colin Wild dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1986, hal. 156 - 163.
7. Lihat, Suyatno, *Revolusi dan Perubahan Sosial di Surakarta*, Makalah Seminar Sejarah Revolusi MSI Yogyakarta, 1988.
Lihat pula, Payung Bangun, *Perang Kemerdekaan di Sumatra Utara Motivasi Untuk Berperan Serta Rakyat*, Seminar Sejarah Lokal di Medan, 1984.
Lihat juga, P.J. Suwarno, *Birokrasi dan Gerakan Rakyat di Yogyakarta*, Makalah Sminar Sejarah Revolusi MSI Yogyakarta, 1988.
8. Anthony Reid, Op.Cit.
9. Lihat, George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, New York, 1952, hal. 256 - 304.
Lihat pula, Herbert Feith, and Lance Castle, *Indonesian Political Thinking*, Cornell University Press, London, 1970, hal. 55.
10. Lihat Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, The Free Press, New York, 1964, hal. 7 - 74.
11. Hamid Abdullah, *Perubahan Sosial dan Revolusi 1945*, Op.Cit.

12. Lihat Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution*, Vintage Book, Random House, New York, 1956.
13. I b i d.
14. Lihat, Georges Lefebvre, *The Coming of the French Revolution*, Princeton University Press, New Jersey, 1971, hal. 110 - 132.
15. Lihat, Marc Bloch, *Feudal Society*, The University of Chicago Press, Chicago, 1970, hal. 259 - 375.
Lihat pula, Jerome Blum, *Lord And Peasant In Russia*, Princenton University Press, 1973, hal. 136 - 152.
16. Lihat Neil Smelser, *Processes of Social Change*, "Sociology", John Wiley & Sons Inc. 1967.
17. Crane Brinton, Op. Cit.
18. George Lefebvre, Op. Cit.
19. Lihat, J.B. Chitambar, *Introductory Rural Sociology*, WEP Limited, New Delhi, 1973, hal. 339.
20. I b i d.
21. Chitambar, Op.Cit, hal. 339 - 340.
22. Crane Brinton, Op.Cit, hal. 140 - 152.
Lihat pula, Marc Bloch, *The Historian's Craft*, A. Vintage Book, New York, 1951.
23. Lihat, Hamid Abdullah, *Revolusi Perancis 1789*, Tesis Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1965.
24. Hamid Abdullah, Op. Cit.
25. George Lefebvre, Op. Cit, hal. 16.
26. Lihat, Hamid Abdullah, *Sejarah Kebudayaan Barat Dan Perkembangan Pemikiran Moderen*, UNDIP Semarang, 1985, hal. 19 - 37.
27. Lihat, Mattulada, *LA T O A*, Tesis Doktor, UI, Jakarta, 1975, hal. 383.
28. Lihat, Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, INTI IDAYU PRESS, Jakarta, 1985, hal. 84.
29. Lihat, Naskah Lontara Latoa.
30. Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, Op. Cit, Hal. 81.
31. Lihat, Naskah Lontara Goa. Lihat pula Naskah Lontara Wajo.
32. Lihat, Andi Zainal Abidin Faried, *Butir-butir Kata Berbbikmat Negarawan Bugis Makassar*, KOPERTI VII, Ujung Pandang, 1973, hal. 19 - 20.
33. Lihat, Lontara Wajo (Abdul Razak Daeng Patunru, hal. 40 - 41).
34. Mattulada, Op. Cit.
35. Hamid Abdullah, Op. Cit, Hal. 5 - 25.
36. Lihat, Harun Kadir, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan*, UNHAS, Ujung Pandang, 1982, hai. 45.
37. Lihat, Anhar Gonggong, *Perang Kemerdekaan, Revolusi, Dan Perubahan Sosial*

- di Sulawesi Selatan, 1945 - 1950*, Makalah Seminar Sejarah MSI Yogyakarta, 1988, hal. 9.
38. Lihat, Suryadi .. Sanusi, *Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*, Tesis Sarjana Fakultas Sastra UNHAS, Ujung Pandang, 1985, hal. 80 - 85.
Lihat pula, H. Laside, *Andi Pangerang*, Lembaga Sejarah Dan Anthropologi, Ujung Pandang, 1976.
39. Harun Kadir, Op. Cit, hal. 126 - 137.
Lihat, DR. Ide Anak Agung Gde Agung, SH, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal. 51.
Perhatikan dokumen Arsip Jakarta No. 132, tentang laporan kepolisian RI tanggal 6 April 1950. Perhatikan pula Arsip No. 801, yaitu arsip Kabinet Perdana Menteri.
40. Lihat, Leonard Y. Andaya, *The Kingdom Of Johor 1641 - 1728*, OUP, London 1975, Hal. 289 - 314. Lihat pula, R.J. Wilkinson, *A History of the Peninsular Malaya*, Singapore, 1923.
41. Lihat, Richard O. Winstedt, *A History Of Malaya*, Marican & Sons SDN. BHD, Kuala Lumpur, 1982, Hal. 144 - 158. Lihat pula, Hamid Abdullah, *Dinamika Sosial Emigran Fugis Makassar di Linggi, Malaysia*, Dalam *Dinamika Bugis Makassar* (ed), PLPIIS - YIIS, Jakarta, 1986.
42. Lihat, Hamid Abdullah, *Peranan Militer Bugis Pada Abad XVIII di Semenanjung*, Majalah Analisis Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1984, Hal. 79 - 94.
43. R.J. Wilkinson, Op. Cit.
R.O. Winstedt, Op. Cit.
Naskah Silsilah Melayu dan Bugis.
44. Lihat, Hamid Abdullah, *Kepemimpinan Dan Pemerintaban Gabungan Melayu Bugis*, Makalah Seminar Bersama Bahasa, Sastra, Dan Budaya, Malaysia - Indonesia, UGM, 1986, Hal. 1 - 6
Lihat pula, Raja Ali Haji, *Tuhfat al-Nafis*.
45. Leonard Y. Andaya, Op. Cit.
46. Lihat, Raja Ali Haji Tuhfat al-Nafis.
47. Hamid Abdullah, Op. Cit.
48. ibid. Lihat pula Naskah Silsilah Melayu dan Bugis.
49. R.O. Winstedt, Op. Cit.
Leonard Y. Andaya, Op. Cit.
50. Lihat, R.O. Winstedt, Op. Cit, Hal. 154.
Lihat pula, Tengku Luckman Sinar, *Kepablawaan Yamtuan Muda Raja Haji Fisabilillah Marbom Teluk Ketapang*, Makalah Seminar Sejarah Raja Haji di Riau, 1987, hal. 5.
Lihat pula Netscher, "De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 - 1865, Historische Beschrijving, VBG 35/1370.

51. I b i d.
52. R.O. Winstedt, Op. Cit.
Lihat pula Silsilah Melayu dan Bugis.
53. Lihat, Hamid Abdullah, *SIRI, ETOS BUDAYA SULAWESI SELATAN*, Makalah Seminar di Dewan Kesenian Jakarta, TIM, 1986.
Lihat pula, Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar, Op. Cit.
54. Harun Kadir, Op. Cit, Hal. 88 - 89.
Lihat pula Sagimun Mulus Dumadi, *Andi Pangerang Daeng Rani*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1982.
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit.
55. I b i d.
Suryadi A. Sanusi, Op. Cit.
56. I b i d.
57. Lihat, Tim Penyusun Biografi Pahlawan Propinsi Sulawesi Selatan, *Himpunan Biografi Empat Pahlawan Daerah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang, 1977, Hal. 55.
58. Harun Kadir, Op. Cit, Hal. 88 - 89.
59. Sagimun Mulus Dumadi, Op. Cit.
60. Suryadi A. Sanusi, Op. Cit.
Harun Kadir, Op. Cit. Hal. 89.
61. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit. Hal. 51.
62. I b i d.
63. Arsip Nasional cabang Sulawesi Selatan, Koleksi Kementerian NIT, No. Inv. 10, No. Inv. 129, No. Inv. 126.
Harun Kadir, Op. Cit.
64. Hasil wawancara dengan M. Saleh Lahade di Jakarta pada bulan Maret '89.
65. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit, Hal. 52.
66. Lihat, manuskrip Makkaeng Daeng Mandjarungi, 1950.
67. I b i d.
68. I b i d.
69. I b i d.
70. Lihat, Willem Ijzereef, *DE ZUID CELEBES AFFAIRE. Kapitein Westerling en de Standrechtelijke executies*, De Bataafsche Leeuw, 1984, Hal. 88 - 90.
71. Dokumen Kelompok Pejuang Polombangking 17 April 1950.
Manuskrip Makkaeng Daeng Mandjarungi, Op. Cit.
72. I b i d.
73. I b i d.
Harun Kadir, Op. Cit.
74. I b i d.
75. Harun Kadir, Op. Cit. Hal. 201 - 202.
Willem Ijzereef, Op. Cit. Hal. 95 - 108.

BIBLIOGRAFI

Sumber Primer

1. Manuskrip Makkaraeng Daeng Mandjarungi, 20 Pebruari 1950.
2. Dokumen usul Parti Lipang Bajeng Kepada Nefis Makassar pada 6 Januari 1948. Surat ini berisi permohonan untuk mengembalikan Harta Benda Rakyat yang dirampok oleh pasukan Westerling ketika melaksanakan operasi.
3. Dokumen keinginan perjuangan Rakyat Indonesia Timur mendukung Republik Indonesia, 27 Desember 1949.
4. Dokumen sikap Rakyat Indonesia Rimur, khususnya pejuang di Polmbangking, yang mendukung Republik yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, 17 April 1950.
5. Inventaris No. 90.
Kabinet Perdana Menteri 1949 - 1950, tentang suasana politik di Indonesia Timur.
6. Register der Besluiten van den CONICA Makassar No. 25, 8 Januari 1946.
7. Dokumen usaha mendirikan komisi penasihat badan pemerintahan yang ditaja oleh NICA, 7 Januari 1946.
8. Dokumen Biro Pejuang Republik Indonesia, 25 Mei 1950.
9. Proklamasi Seluruh Rakyat Pengikut Republik Indonesia di Indonesia Timur, 17 April 1950.
10. Dokumen Arsip Nasional cabang Ujung Pandang, koleksi Kementerian NIT, 14 Januari 1946. No. Inv. 126. Tentang pembentukan badan penasihat pemerintahan (NICA).
11. Dokumen Kepala Kepolisian RI Tentang Keadaan di Indonesia Timur. 6 April 1950 No. 354/AR/Pam/DKN/150. No. Inventaris 132.
12. Dokumen Arsip Kabinet Perdana Menteri, inventaris No. 801. Rencana Pemerintah RI untuk mengatasi masalah yang muncul di Sulawesi Selatan.
13. Naskah Lontara Latoa.
14. Naskah Lontara Wajo,
15. Naskah Lontara Goa.
16. Naskah Silsilah Melayu Bugis.
17. Naskah Tuhfat al-Nafis.

Sumber Skunder

- Abdullah, Hamid, 1985, *Manusia Bugis Makassar*, Jakarta, INTI IDAYU PRESS.
-, 1965, *Revolusi Perancis 1789*, Tesis Sarjana Sejarah UGM, Yogyakarta.
-, 1985, *Sejarah Kebudayaan Barat Dan Perkembangan Pemikiran Moderen*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-, 1988 *Revolusi Dan Perubahan Sosial Di Sumatra Timur*, Makalah Seminar Sejarah Revolusi MSI, Yogyakarta.

-, 1988, *Perubaban Sosial Dan Revolusi 1945*, Artikel Harian Suara Merdeka, Semarang.
-, 1986, *Soekarno Versus van Mook*, Artikel Harian Suara Merdeka, Semarang.
-, 1984, *Peranan Militer Bugis Pada Abad XVIII Di Semenanjung*, Majalah Analisis Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
-, 1983, *Islam Dan Perubaban Sosial Di Indonesia*, Majalah Analisis Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-, 1986, *Kepemimpinan Dan Pemerintaban Gabungan Melayu - Bugis*, Makalah Seminar Indonesia - Malaysia UGM, Yogyakarta.
-, 1986, *SIRI, ETOS BUDAYA SULAWESI SELATAN*, Makalah Seminar Di Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
-, 1986, (ed), *Dinamika Sosial Emigran Bugis Makassar Di Linggi, Malaysia*, dalam "Dinamika Bugis Makassar, PLPIIS - YIIS, Jakarta.
-, 1980, *Karya Raja Ali Haji Sebagai Sumber Sejarah*, dalam Sastra Dan Sastrawan, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
-, 1984, *Perubaban Sosial Dikalangan Masyarakat Keturunan Bugis Di Linggi Dengan Rujukan Khas Kepada Masalah Kepemimpinan*, Tesis Ph. D Universitas Malaya, Kuala Lumpur.
- Agung, Ide Anak Agung Gde, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Andaya, Y. Leonard, 1975, *The Kingdom Of Jobor 1641 - 1728*, OUP, London.
- Bloch, Marc, 1970, *Feudal Society*. The University of Chicago Press, Chicago.
-, 1951, *The Historian's Craft*, A. Vintage Book, New York.
- Blum, Jerome, 1973, *Lord And Peasant In Russia*, Princenton University Press, Princenton.
- Bangun, Payun, 1984, *Ferang Kemerdekaan Di Sumatra Utara Motivasi Untuk Berperan Serta Rakyat*, Seminar Sejarah Lokal, Medan.
- Brinton, Grane, 1956, *The Anatomy Of Revolution*, Vintage Book, Random House, New York.
- Beattie, John, 1979, *Other Cultures*, DEP, Kuala Lumpur.
- Coser, A. Lewis, 1964, *The Functions of Social Conflict*, The Free Press, New York.
- Chitambar, J.B., 1973, *Introductory Rural Sociology*, WEP Limited, New Delhi.
- Dumadi, Sagimun Mulus, 1982, *Andi Pangerang Daeng Rani*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
- Evans, E.E. Pritchard, (ed), 1964, *Social Anthropology and Other Essays*, The Free Press, New York.
- Eisenstadt, S.N., 1969, *The Political Systems of Empires*, The Free Press, New York.
- Faried, Andi Zainal Abidin, 1973, *Butir-butir Kata Berkibikat Negarawan Bugis Makassar*, KOPERTI VII, Ujung Pandang.
- Firth, Raymond, 1959, *Social Change in Tikopia*, London

- Feith, Harbart, and Lance Castles, 1970, *Indonesian Political Thinking*, Cornell University Press, London.
- Gonggong, Anhar, 1988, *Perang Kemerdekaan, Revolusi Dan Perubahan Sosial Di Sulawesi Selatan, 1945 - 1950*. Makalah Seminar Sejarah MSI, Yogyakarta.
- Haji, Raja Ali, *Silsilah Melayu Bugis Dan Sekalian Raja-rajanya*.
....., Tuhfat al-Nafis.
- Ijzereef, Willem, 1984, *DE ZUID CELEBES AFFAIRE, Kapitein Westerling en de Standrechtelijke Executies*, De Bataafsche.
- Harun Kadir, 1982, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Sulawesi Selatan*, UNHAS, Ujung Pandang.
- Kartodirdjo, Sartono, 1966. *The Peasant's Revolt of Banten In 1838*, Martinus Nijhoff.
- Kahin, George McTurnan, 1961, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, New York.
- Lefebvre, Georges, 1971, *The Coming of the French Revolution*, Princeton University Press, New Jersey.
- Laside, Haji, 1976, *Andi Pengerang*, Lembaga Sejarah dan Antropologi, Ujung Pandang.
- Mattulada, 1975, *L A T O A*, Tesis Doktor, UI, Jakarta.
- Reid, Anthony, 1969, *The Contest For North Sumatra*, OUP, Kuala Lumpur.
....., 1979, *The Blood of the People*, OUP, Kuala Lumpur.
- Resink, G.J., 1987, *Raja Dan Kerajaan Yang Merdeka Di Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Sinar, Tengku Luckman, 1987, *Kepablawanan Yamtuan Muda Raja Haji Fisabilillah Marbum Teluk Ketapang*, Makalah Seminar Sejak Raja Haji, Riau.
- Suyatno. 1988, *Revolusi Dan Perubahan Sosial Di Surakarta*, Makalah Seminar Sejarah Revolusi MSI, Yogyakarta.
- Suwarno, P.J., 1988, *Birokrasi Dan Gerakan Rakyat Di Yogyakarta*, Makalah Seminar Sejarah Revolusi MSI, Yogyakarta.
- Sanusi, A. Suryadi, 1985, *Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*, Tesis Sarjana UNHAS Ujung Pandang.
- Smelser, Neil J., 1967, *Processes of Social Change*, "Sociology", John Wiley & Sons, New York.
- Wild, Colin dan Peter Carey, 1986, *Gelora Api Revolusi*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Wertheim, W.F., 1959, *Indonesian Society in Transition*, Gravenhage, Brussel.
- Wilkinson, R.J., 1923, *A History of the Peninsular Malays*, Singapore.
- Winstedt, R.O., 1982, *A History of Malaya*, Marican & Sons SDN. BHD., Kuala Lumpur.

RIWAYAT HIDUP



- Nama lengkap : Prof. Dr. Hamid Abdullah.
Tempat tanggal lahir : 3 Maret 1940, di Makassar (Ujung Pandang)
Pangkat dan Jabatan : Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, Guru Besar, Pembina Utama Madya Gcl. IV/d.
A g a m a : Islam

Riwayat singkat pekerjaan :

1. 1963, Asisten Tugas-Belajar Fakultas Sastra UNHAS di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.
2. 1965 - 1969, Dosen Fakultas Sastra UNHAS.
3. 1970 sampai sekarang, Dosen Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang.

Pendidikan :

1. Dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas di Ujung Pandang, 1953 - 1959.
2. 1959 - 1965, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM di Yogyakarta.
3. 1977, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Aceh.
4. 1984, Ph. D (Doktor) dalam Ilmu Sejarah pada University Malaya, Malaysia.

Organisasi Profesi

- : Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Propinsi Jawa Tengah.

Istri

- : Andi Harmoniar

Anak-anak

- : 1. Purnawarman Jayawardhana
2. Inu Kertapati
3. Mohammad Salahuddin
4. Muhammad Ghazali
5. Dody
6. Ali Imran
7. Nur Annisa

A. Dalam bentuk buku

1. Manusia Bugis Makkasar, PT. Idayu Press, Jakarta, 1985.
2. Dari Universitas Semarang ke Universitas Diponegoro, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1984.
3. Sejarah Kebudayaan Barat Dan Perkembangan Pemikiran Modern (bersama Mulyono). Badan Penerbit UNDIP, 1985.
4. Sekitar Kehidupan Harmonis Manusia Jawa, LIPI Jakarta, 1986.
5. Tingkat Kesadaran Sejarah Masyarakat Propinsi Jawa Tengah : Kotamadya Semarang. (hasil penelitian), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1987.
6. Dinamika Sosial Emigran Bugis Makassar Di Linggi, Malaysia. (ed) "Dinamika Bugis Makassar", PLPIIS-YIIS, 1986.

Buku yang sedang siap cetak

- a. Kepemimpinan Dan Pemerintahan Gabungan Melayu-Bugis di Semenanjung. Oleh penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- b. Andi Pangerang Pettz Rani, Profil Pemimpin Yang Manunggal Dengan Rakyat. Oleh BAPPEDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Karya penelitian.
- c. Prof. DR. H.A. Amiruddin, Potret Pemimpin Reformis Sulawesi Selatan. Oleh BAPPEDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Karya penelitian.

B. Makalah Seminar

Puluhan makalah seminar yang telah disajikan dalam pertemuan ilmiah di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Riau, Medan, Surabaya, Ujung Pandang dan sebagainya. Semua makalah itu, telah disajikan diberbagai universitas di tanah air dan oleh lembaga swasta dalam rangka kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat. Seperti, di Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya.

C. Karya tulis di majalah dan surat kabar.

Lebih dari 100 (seratus) artikel dan essay yang telah diterbitkan di Majalah dan Surat Kabar di Malaysia dan di Indonesia. Adapun majalah yang menerbitkan karya saya tersebut, adalah :

1. Majalah Analisis Kebudayaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
2. Majalah Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
3. Majalah Muzeum Malaysia, Kuala Lumpur.
4. Majalah Fakultas Sastra Undip.

Sedang kelompok Surat Kabar yang menerbitkan artikel saya yang jumlahnya lebih dari seratus itu, adalah :

1. Surat kabar harian "WAWASAN" di Semarang.
2. Surat kabar harian "SUARA MERDEKA" di Semarang.
3. Surat kabar harian "SINAR HARAPAN" di Jakarta.
4. Surat kabar harian "SUARA PEMBAHARUAN" di Jakarta.
5. Surat kabar harian "KOMPAS" di Jakarta.
6. Surat kabar Harian "SUARA KARYA" di Jakarta

